PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
JL. PANJI NOMOR : 120 TELP : 0341-393730 FAX : 0341-393731
KEPANJEN - MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah terselesaikannya penyusunan kembali Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dengan adanya tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada itu, peran aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting serta Dengan adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 serta Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;

Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan penyusunan perencanaan yang strategis dengan menyusun dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 2016 -2021 ini dilakukan melalui Rapat Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan telah memperoleh masukan dari para pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, lintas sektor terkait, pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan para Kepala Puskesmas se Kabupaten Malang. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih kepada para pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini.

Akhirnya, semoga upaya kita bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mendapatkan rakhmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, Amin.

Malang, Agustus 2017

KEPALA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi… iii

Bab I Pendahuluan 1
4.1. Latar belakang 1
4.2. Landasan Hukum 2
4.3. Maksud dan Tujuan 4
4.4. Sistematika 4

Bab II. Gambaran Pelayanan 6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi …….. 6
2.2. Sumberdaya 32
2.3. Kinerja Pelayanan 37
2.4. Tantangan dan Peluang… 44

Bab III. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi. 46
3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 48
3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan.....49
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis… 51
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis… 51

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 53
4.2. Tujuan dan sasaran 53
4.3. Strategi dan Kebijakan..... 60

Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....
5.1. Program dan Kegiatan..... 64
5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 68

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang… 81

Bab VII. Penutup..... 83

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/120/KEP/35.07.103/2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Permendagri 54 tahun 2010 diatur secara detil proses hingga format susunannya. Dokumen perencanaan lima tahunan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai pembagian urusan dan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Yang kesemuanya itu merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagi dokumen perencanaan, dalam Renstra ditetapkan target indikator kinerja beserta pendanaannya yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen Renstra perangkat daerah ini kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat daearah (Renja) sebagaimana pasal 273 (UU No 23/2014).

Sehubungan dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor : 44 Tahun 2017, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga melakukan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Dalam mendukung pencapaian visi-misi RPJMD maka Dinas Kesehatan perlu membuat dokumen Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin konsistensi dan singkronisasi maka dalam proses penyusunan Renstra ini dilakukan pembacaan yang cukup intens atas dokumen rujukan, yaitu dalam hal ini RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dengan juga mempertimbangkan

capaian dan kendala pembangunan periode sebelumnya terutama dalam bidang kesehatan.

Melalui Perubahan Renstra ini, keberhasilan RPJMD Kabupaten Malang dengan visi-misinya Madep Manteb Manetep dapat terwujud dengan baik .

Selain merujuk RPJMD 2016-2021 dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan juga mendasarkan dan mempertimbangkan dokumen yang terkait, yaitu Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provini Jawa Timur dan dokumen pembangunan wilayah (RTRW). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi overlapping dan salah sasaran dalam praktik di lapangan nantinya. Akhirnya dengan kata lain, Renstra Dinas Kesehatan ini disusun dengan upaya maksimal agar bisa ber kontribusi dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah KabupatenMalang.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara;
2. UU No. 25 th 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
8. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden RI No. 7/1999 : tentang AKIP;
10. Peraturan Presiden no.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Permendagri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tahapan. Tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Permen PAN 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (membatalkan PermenPAN no.29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP);
14. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Kementrian Kesehatan;
15. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
16. Permenkes Nomor 49 Tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Malang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 202;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Perbup Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 188.4/ 137/KEP/35.07.103/2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pembangunan dan pelayanan bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, unit dibawahnya (UPTD/Puskesmas), dan stakeholder terkait.
2. Sebagai pedoman (*reminder*) indikator bagi Dinas Kesehatan beserta unit dibawahnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
3. Sebagai rujukan penyelaras capaian/program Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah:

1. Tersedianya dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman kunci Rencan Kerja
2. Tersedianya dokumen Renstra sebagai acuan indikator evaluasi kinerja lima tahun Dinas Kesehatan
3. Sebagai upaya penyempurnaan/peningkatan target pencapaian kinerja lima tahun sebelumnya

1.4. Sitematika Penulisan

Proses penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini dilakukan oleh tim penyusun dengan melibatkan seluruh bidang/seksi serta stakeholder terkait. Keterlibatan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 2016-2021

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi .

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

BAB V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

BAB VII **PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

1.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang/urusannya. Dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Kesehatan dikepalai oleh seorang kepala dinas dengan dibantu sekretaris dan beberapa bidang. Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah untuk menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang bebentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
2. Perencanaan strategis dan kebijakan teknis pada Dinas Kesehatan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesehatan
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kesehatan
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan
8. Pembinaan UPTD
9. Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, obat dan makanan serta penyusunan program;
10. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan;
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
12. Pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

Sedangkan strukur organisasi Dinas Keseahatan Kabupaten Malang sebagaimana SOTK Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

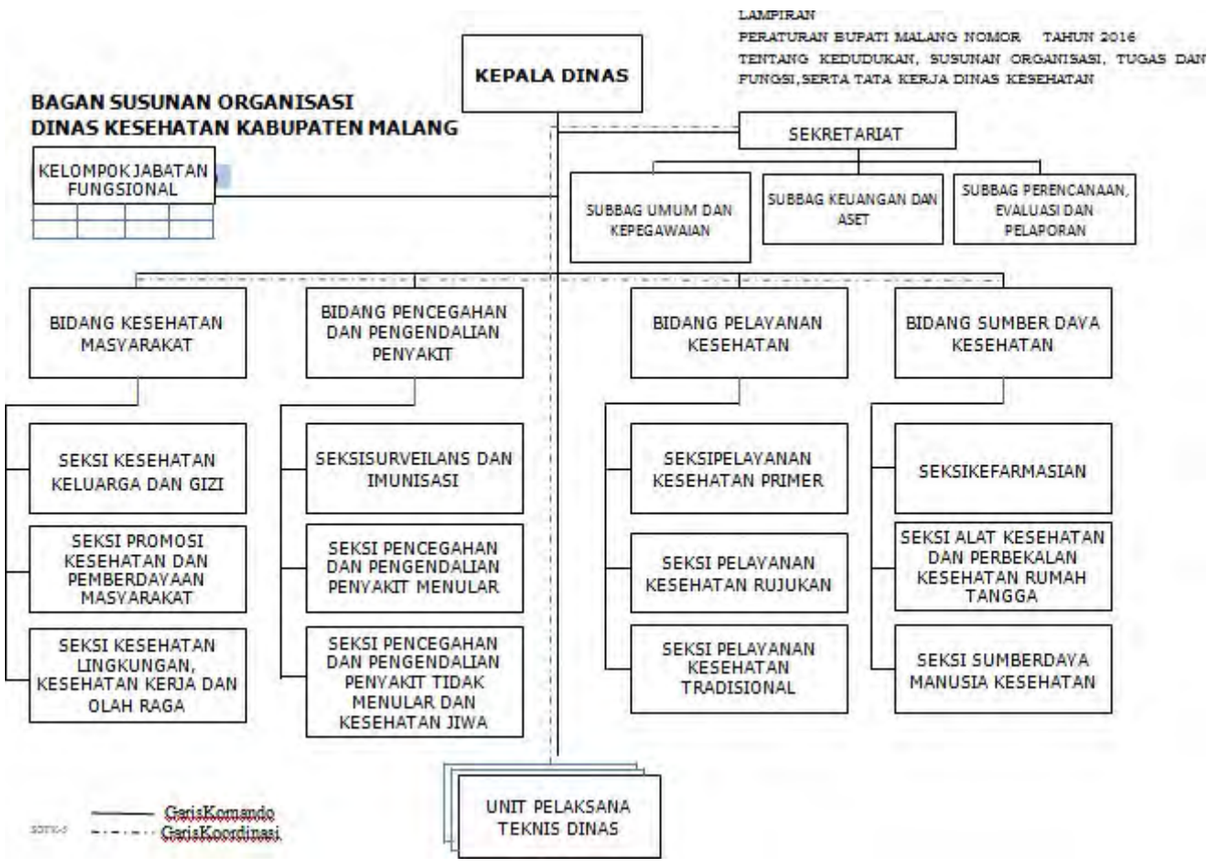

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Memimpin Dinas Kesehatan dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan kesehatan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan, urusan evaluasi dan pelaporan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan umum yang meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan dan pengelolaan asset, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan sistem informasi program Dinas Kesehatan; dan
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
c. Pengelolaan urusan rumah-tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan pengelolaan adminitrasi keuangan dan kekayaan daerah;
e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.
h. Penyiapan, menyusun dan mengelola peraturan hukum bidang kesehatan.
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Di dalam sekretariat terdiridari tiga sub bagian, yaitu:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

   Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

   a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Informasi;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kesehatan tingkat Daerah;
   c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kesehatan;
   d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan perencanaan lintas sektor;
   e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kesehatan;
   f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kesehatan;
   g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kesehatan;
   h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Kesehatan;
   i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kesehatan;
   j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
   k. Menyusun dan menyiapkan berkas didalam pengelolaan informasi bidang kesehatan;
   l. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi bidang kesehatan;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan BMN;
b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
d. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
e. Menyelenggarakan penyusunan atas perolehan BMN;
f. Menyiapkan dan memfasilitasi BMN yang dicatat menjadi BMD;
g. Melaksanakan pengurusan perpindahan gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
h. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kesehatan;
i. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan, hasil laporan akuntabilitas Dinas Kesehatan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianSub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor dan aset;
e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
g. Menghimpun, mengolah data, menyusun, monitoring dan evaluasi program kerja Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
h. Menyiapkan berkas penyusunan dan pengelolaan peraturan hukum di bidang kesehatan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat program penyehatan lingkungan, makanan dan minuman, program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penjabaran kebijakan, pengembangan pedoman dan standar pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. Penggerakan program dan kegiatan serta peningkatan mutu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan dan perizinan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
e. Penyelenggaraan surveilans (pengamatan) kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
f. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya

kesehatan program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

   Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas:

   a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
   b. Menyiapkan bahan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
   c. Menyiapkan bahan Pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
   d. Melaksanakan teknis kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;

e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
f. Melaksanakan surveilans kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan gizi masyarakat;
g. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi;
h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
i. Melaksanakan urusan administrasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam urusan komunikasi, informasi dan edukasi

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
d. Melaksanakan teknis kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
h. Melaksanakan urusan administrasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga di masyarakat;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
d. Melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta perizinan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
f. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
g. Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan teknis

dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko

yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;

d. Penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan
i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi

Seksi Survelains dan Imunisasi mempunyai tugas:

a. Penyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
c. Menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yeng berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah, bencana, penanggulangannya serta kesehatan haji;
d. Melakukan penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) serta kesehatanhaji;
e. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
f. Melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;

h. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
i. Menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan da Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
c. Melakukan penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
e. Melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
g. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
h. Menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
i. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan kejadian penyakit menular langsung;
j. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan kejadian penyakit menular langsung;
k. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan kejadian penyakit menular langsung;
l. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian kejadian penyakit menular langsung; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;

c. Menyiapkan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;

d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;

f. Pemantauan, evaluasi, pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta menfasilitasi program pelayanan kesehatan primer, program pelayanan kesehatan rujukan dan program pelayanan kesehatan tradisional;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan serta manajemen program Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

e. Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
f. Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan;
g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
h. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran canggih;
i. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan; dan
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan primer;
c. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan primer;

d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan primer;
e. Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan primer;
f. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
g. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehata Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehata Rujukan mempunyai tugas:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
c. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan rujukan;
d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
e. Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan rujukan;

f. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran canggih;
g. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
e. Mengelola pemberian rekomendasi izin dan sertifikasi pelayanan kesehatan tradisional;
f. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sarana pelayanan kesehatan tradisional; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan

Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan operasional dan penetapan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
b. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Kefarmasian, makanan dan minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia kesehatan;
c. Penyusunan perencanaan dan pengadaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
d. Pengkoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral pelaksanaan Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta sumberdaya manusia kesehatan;
e. Pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang Sumber Daya Kesehatan;
f. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. Pengelolaan perizinan dan rekomendasi bidang Sumber Daya Kesehatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta menyiapkan bahan perencanaan pengadaan obat dan pengawasan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
b. Melaksanakan bimbingan, upaya dan promosi di bidang sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan mutu obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, obat tradisional dan kosmetika, makanan dan minuman;
d. Menyiapkan bahan dan proses perizinan distribusi pelayanan obat dan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
e. Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam hal perencanaan dan pengadaan, pendistribusian kebutuhan alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada unit pelayanan kesehatan;

b. Menyusun rencana pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
c. Menyusun perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
e. Melaksanakan standarisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
f. Melaksanakan inventarisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
g. Melakukan penilaian teknis terhadap kondisi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
h. Memberikan rekomendasi dan rekomendasi teknis Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
j. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:
   a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
   b. Penyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi,

sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;

c. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan perijinan praktek tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Type C, type D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/specialis rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta penunjang yang setara;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional kesehatan dan penyelenggaraan administrasi DUPAK tenaga kesehatan;
e. Menyiapkan bahan, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
g. Mengelola administrasi pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Unit Pelaksana Teknis adalah unit di bawah Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Tugas UPT Puskesmas :

1. Melaksanakan kewajiban kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di

wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Fungsi UPT Puskesmas :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

b. UPTD Labolatorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas UPT Labkesda :

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang laboratorium kesehatan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Fungsi UPT Labkesda :

1. Penyusunan program kerja UPT Labkesda.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris.
3. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium.
4. Penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium.
5. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program , tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Labkesda.
6. Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik (SPP).
7. Pengelolaan pengaduan masyarakat
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Tugas UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan :

1. Melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi di lingkungan pemerintah dan swasta.
2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan di lingkungan Dinas.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Fungsi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan :

1. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan standar standar kerja alat kesehatan.
2. Pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan perlengkapannya.
3. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
4. Pengendalian mutu.
5. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan.
6. Pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan di lingkungan Dinas.
7. Pelaksanaan ke Tata Usahaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumberdaya DINAS KESEHATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Malang didukung oleh keberadaan sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia/aparatur dan sumberdaya sarana-prasarana yang memadai. Sumbedaya yang dimaksud adalah keberadaan tenaga kerja dan sarana-prasarana kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut:

JUMLAH PEGAWAI PER UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT	59	
2	BIDANG PPKM	24	
3	BIDANG PKSL	17	
4	BIDANG P2M	15	
5	BIDANG FARMAKMIN	17	
6	BP PEMKAB	10	
7	GUDANG OBAT	7	
8	PUSKESMAS	1799	
	UPTD Labkesda	6	
	JUMLAH	1.955	

Sedangkan menu'rut golongan tenaga kerja yang ada di Dinas kesehatan adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

No	Golongan	Jumlah (Org)	Ket.
1	Golongan IV	38	
2	Golongan III	590	
3	Golongan II	413	
4	Golongan I	7	
5	PTT	174	
6	Honorer	135	
7	Kontrak Pemda	118	

8	Ponkesdes	390	
9	Kontrak Dinas	89	
	Jumlah	1.955	

Menurut jenis pendidikan dan jabatan struktural, tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI PER JENIS TENAGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

NO	JENIS TENAGA	CP/CPNS	PTT	KONTRAK	SUKWAN	JUMLAH
1	Dokter	44	0	4	0	48
2	Dokter Gigi	29	2	20	0	51
3	Bidan	368	172	0	7	547
4	Perawat	194	390	20	27	631
5	Perawat Gigi	22	0	2	1	25
6	Gizi	38	0	1	2	41
7	Farmasi	43	0	2	4	49
8	Analis Kesehatan	29	0	1	3	33
9	Penyuluh Kesehatan	6	0	0	2	8
10	Epideniologi	3	0	0	0	3
11	Entomolog	1	0	0	0	1
12	Sanitarian	33	0	1	2	36
13	Struktural Es IV	15	0	0	0	15
14	Struktural Es III	5	0	0	0	5
15	Struktural Es II	1	0	0	0	1
16	Umum	216	0	118	87	421
	JUMLAH	1047	567	206	135	1.955

2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Kesehatan Pemerintah

a. Rumah Sakit Pemerintah : 4 buah
b. Rumah Sakit Jiwa : 1 buah
c. Puskesmas perawatan : 39 buah
d. Puskesmas pembantu : 93 buah
e. Mobil Puskesmas Keliling : 93 buah

b. Sarana Kesehatan Swasta

- RS. Umum Swasta : 12 buah
- RS. Jiwa : 2 buah
- Rumah Bersalin Swasta : 3 buah
- Balai Sakit Bedah : 1 buah
- Klinik Rawat Inap : 12 buah

- Apotek : 122 buah.

c. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) :

a. Polindes (Pos Bersalin Desa) : 390 buah
b. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) : 2.816 buah
c. POD (Pos Obat Desa) : 13 buah
d. Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) : 227 buah
e. UKK (Upaya Kesehatan Kerja) : 330 buah
f. SBH (Saka Bhakti Husada) : 39 kelompok

d. Aset Dinas Kesehatan.

NILAI ASET
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015

Kode	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des. 2015.	
		Jumlah	Harga (Ribuan)
12	**Pemerintah Kab. / Kota**		
10	Tanah	2	676.348.475,-
03	Alat angkuran	51	2.784.576.932,-
04	Alat kantor dan rumah tangga	2	8.000.000,-
06	Alat bengkel dan alat ukur	2.121	10.049.426.154,-
07	Alat studio dan komunikasi	67	291.408.420,-
08	Alat – alat kedokteran	9.121	59.203.454.277,-
09	Alat laboratorium	85	7.016.943.008,-
11	Bangunan gedung	184	36.529.352.418,-
13	Jalan dan jembatan	1	381.200.000,-
14	Bangunan air	1	191.972.500,-
17	Buku / perpustakaan	258	25.595.750,-
98	**Ekstrakomtabel**		
06	Alat kontor dan rumah tangga	11	2.419.000,-
08	Alat – alat kedokteran	1.400	91.861.000,-
		13.304	117.252.557.934,-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Hasil sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan Tahun 2011 - 2015 dengan indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator standar pelayanan minimal dapat digambarkan sebagai berikut :

Terkait Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Dinas Kesehatan tiap tahun akan melaksanakan survey yang dilaksanakan pihak ketiga, adapun Survey IKM baru dimulai tahun 2015 sebelumnya belum ada, dari target IKM 70 (baik) tahun 2015 hasil survey yang telah dilakukan sebesar 75,62 atau sebesar 108%, diharapkan kedepan ada peningkatan capaian nilai IKM.

Untuk Program Pemberantasan Penyakit (P2) dari indikator yang ditetapkan khususnya indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai target , adapun indikator lainnya sebagai indikator penunjang ada beberapa yang masih belum mencapai target antara lain : Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita , Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif hal ini di karenakan Kurangnya kemampuan petugas dalam tatalaksana penentuan diagnosa, Pelaporan dari RS belum tercatat, Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat kurang.

Secara keseluruhan untuk program di bidang Pengelolaan dan Pengawasan Farmasi Makanan Minuman dan Alat Kesehatan (PPFMA) dari indikator yang ditetapkan rata - rata sudah bisa mencapai target , khusunya indikator yang ditetapkan sebagai IKU yaitu Prosentase IRTP yang bersertifikat sudah bisa mencapai target sebesar 80% dari target 80% yang tetapkan .

Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dengan indikator IKU yaitu AKI dan AKB sudah bisa mencapai target dari capaian tiap tahunnya , sedangkan indikator penunjang lainnya rata - rata juga sudah mencapai target , jadi untuk program KIA bisa dikatakan berhasil dan terkendali , sedangkan untuk program Gizi yang digunakan sebagai IKU sudah bisa mencapai target dari tiap tahunnya dengan kata lain bahwa program gizi masih bisa dikendalikan dan ditingkatkan.

Untuk program Kesehatan Lingkungan indikatornya di tekankan pada Desa ODF desa dimana bebas dari berak sembarang tempat yang ditandai dengan kepemilikan jamban keluarga pada setiap keluarga pada sasaran Renstra dimaksud untuk ODF targetnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dibanding dengan target nasional Kabupaten.

Program Pemberdayaan indikatornya ditekankan pada desa Siaga Aktif yang mana capaian indikator tersebut setiap tahunnya bisa tercapai 100%.

Untuk Program Pelayanan Kesehatan dari indikator yang ditetapkan secara keseluruhan sudah bisa tercapai sesuai target dengan kata lain untuk program palayanan kesehatan bisa dikatakan berjalan dengan baik dan sudah memenuhi standar yang ditentukan .

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tertera dalam tabel 2.1.

TABEL 2.1.

PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2013 - 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA 2013-2017					REALISASI CAPAIAN 2013-2017					RASIO CAPAIAN TAHUN 2013-2017				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.**	-	-	70	-	-	70	71	75	-	-	75,62	73,79	76,46	-	-	108,03%	103,93%	101,95%
2	**Prosentase IRTP yang bersertifikat**			55%	70%	75%	80%	80%	80%	70%	75%	80%	80%	80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Menurunnya Angka kematian ibu	118/100.000 KH			118/100.000 KH	118/100.000 KH	118/100.000 KH	118/100.000 KH	118/100.000 KH	89,31	62,28	72,22	52,78	45,32	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi	24/1.000 KH			24/1.000 KH	24/1.000 KH	24/1.000 KH	24/1.000 KH	24/1.000 KH	4,68	6,09	5,95	4,52	1,61	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%
5	Cakupan kunjungan Bumil K4	90,01%			93%	94%	95%	95%	95%	95,25%	92,08%	93,65%	93,65%	93,65%	102,42%	97,96%	98,58%	98,58%	98,58%
6	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani		90,16%		89%	80%	80%	80%	80%	80,18%	89,19%	94,72%	94,72%	94,72%	90,09%	111,49%	118,40%	118,40%	118,40%
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan		84,01%		94%	90%	90%	90%	90%	99,99%	99,99%	100,75%	100,75%	100,75%	106,37%	111,10%	111,94%	111,94%	111,94%
8	Cakupan pelayanan nifas	92,96%			95%	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	96,68%	95,41%	100,18%	100,18%	100,18%	101,77%	106,01%	111,31%	111,31%	111,31%
9	Cakupan neonatal dg komplikasi yg ditangani	81,03%			88%	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	91,00%	91,55%	105,65%	105,65%	105,65%	103,41%	114,44%	132,06%	132,06%	132,06%
10	Cakupan kunjungan bayi		91,52%		90%	90%	90%	90%	90%	95,81%	98,81%	100,55%	100,55%	100,55%	106,46%	109,79%	111,72%	111,72%	111,72%
11	Cakupan pelayanan anak balita	74,24%			90%	90%	90%	90%	90%	84,97%	84,27%	80,59%	80,59%	80,59%	94,41%	93,63%	89,54%	89,54%	89,54%
12	Cakupan peserta KB aktif	74,24%			77%	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	76,48%	70,08%	69,12%	69,12%	69,12%	99,32%	100,11%	98,74%	98,74%	98,74%
13	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas	100% (39 Pusk)			100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Cakupan Lokasi ODF	25 Ds. (5%)			42 Ds. (11%)	48 Ds. (12%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	42 Ds. (11%)	48 Ds. (12%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Cakupan pemeliharaan Alat Kesehatan	100% (39 Pusk)			100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

11	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA 2013-2017					REALISASI CAPAIAN 2013-2017					RASIO CAPAIAN TAHUN 2013-2017				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
16	Cakupan pengelolaan alat kesehatan di puskesmas	25%			45%	60%	75%	75%	75%	45%	60%	75%	75%	75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan bencana	100% (39 Pusk)			100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100% (39 Pusk)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan di RS Kabupaten	100,00%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	Angka Balita Gizi Kurang dari 0,88% menjadi 0,20%	0,88%			0,40%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%	**0,40%**	**0,30%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,20%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
20	Angka Balita Gizi Buruk	***<15%***			<15%	<15%	<15%	<15%	<15%	5,85%	6,39%	5,52%	5,52%	5,52%	149,33%	100,00%	161,00%	157,40%	163,23%
21	Cakupan Foging Focus			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita	20%			60%	80%	100%	100%	100%	12,25%	13,46%	25,87%	25,87%	25,87%	20,42%	16,83%	25,87%	25,87%	25,87%
23	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif		36%		80%	90%	100%	100%	100%	35,83%	34,20%	34,24%	34,24%	34,24%	44,79%	38,00%	34,24%	34,24%	34,24%
24	**Pengendalian kematian kasus diare akibat kolera.**			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Cakupan penemuan penderita diare	58%			80%	90%	100%	100%	100%	103,42%	101,67%	98,04%	98,04%	98,04%	129,28%	112,97%	98,04%	98,04%	98,04%
26	**Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5%**			< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	0,035%	0,044%	0,052%	0,058%	0,059%	100,47%	100,46%	100,45%	100,44%	100,44%
27	**Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD) dibawah CFR (< 2,54)**			< 2.54	< 2.54	< 2.54	< 2.54	< 2.54	< 2.54	1,20	0,48	0,83	0,78	0,77	306,76%	335,10%	321,32%	323,29%	323,69%
28	Cakupan penderita DBD yang ditangani		55%		80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Cakupan penemuan kasus Malaria			1,75 % o	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Cakupan Desa/Kelurahan UCI		82%		86%	88%	100%	100%	100%	97,95%	87,69%	81,79%	81,79%	81,79%	113,90%	99,65%	81,79%	81,79%	81,79%
31	**Pengendalian kematian kasus Acud Flacceid Paralise (AFP) karena polio**			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Cakupan penemuan kasus AFP per 100 ribu anak balita	≥ 2			≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	1,50	2,18	0,34	0,34	0,34	75,07%	108,88%	17,00%	17,00%	17,00%
33	**Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan < 24 jam**	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA 2013-2017					REALISASI CAPAIAN 2013-2017					RASIO CAPAIAN TAHUN 2013-2017				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
34	**Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)**			10%	20%	25%	30%	30%	30%	30,92%	90,00%	91,13%	91,46%	91,76%	154,60%	360,00%	303,77%	304,87%	305,87%
35	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%			100%	100%	100%	100%	100%	2,23%	8,16%	8,17%	8,17%	8,17%	2,59%	9,27%	8,17%	8,17%	8,17%
36	% stok obat minimal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
37	Cakupan penulisan resep obat generik			76%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
38	Cakupan penggunaan obat rasional			55%	70%	75%	80%	80%	80%	70%	75%	80%	80%	80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
39	Cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan			8%	20%	25%	30%	30%	30%	20%	25%	30%	30%	30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
40	Cakupan Desa Siaga Aktif			35%	60%	70%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Cakupan Lokasi ODF			25 Ds. (5%)	42 Ds. (11%)	48 Ds. (12%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	42 Ds. (11%)	48 Ds. (12%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	63 Ds. (16%)	100%	100%	100%	100%	100%
42	% Pengawasan Toko obat dan Apotik			60%	70%	85%	90%	90%	90%	70%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Cakupan Penyuluhan keamanan pangan pada IRTP oleh petugas kesehatan			45%	70%	85%	90%	90%	90%	70%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Cakupan Pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetika dan PKRT			25%	50%	60%	70%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
45	Cakupan Penyuluhan tentang Kosmetika dan PKRT yang aman			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan Monitoring terhadap sarana distributor perbekalan kesehatan dan alkes			25%	50%	60%	70%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Cakupan Penyuluhan tentang produk perbekalan kesehatan yang aman			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	% penggunaan obat tradisional di Puskesmas			2%	3%	4%	5%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	67%	50%	40%	40%	40%

2.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2011 -2015

Anggaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015, mengalami pertumbuhan 4,60 % pada tahun 2011, pada tahun 2012 pertumbuhan meningkat tajam yaitu 33,49% dan tahun 2013 pertumbuhan menurun sekitar -16,68% dan tahun 2014 meningkat sebesar 37,56% dan tahun 2015 pertumbuhan meningkat 14,27%, secara rinci sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN
TAHUN 2011 - 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	RATA RATA PERTUMBUHAN	
					ANGGARAN	REALISASI
1	2011	88.738.565.257	87.345.768.644	93,48%	4,76%	4,76%
2	2012	127.107.095.005	117.511.254.934	92,45%	33,49%	32,60%
3	2013	108.940.064.867	107.070.988.710	98,28%	-16,68%	-9,75%
4	2014	174.458.200.482	156.757.097.025	89,85%	37,56%	31,70%
5	2015	203.497.160.058	190.161.857.188	93,45%	14,27%	17,57%

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 berdasarkan kelompok belanja langsung dan tidak langsung sebagaimana tertera pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDANAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2013 - 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BELANJA LANGSUNG	148.792.718.145	59.118.797.696	59.799.234.272	210.723.531.989	204.658.733.643	136.940.867.805	57.989.140.318	58.048.728.133	201.025.337.379	197.708.006.791	92,03	98,09	97,07	95,40	96,60	5,99%	6,72%
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.704.441.914	210.723.531.989	204.658.733.643	59.118.797.696	59.799.234.272	53.249.046.080	201.025.337.379	197.708.006.791	57.989.140.318	58.048.728.133	97,34	95,40	96,60	98,09	97,07	5,99%	6,72%
	JUMLAH	203.497.160.059	269.842.329.685	264.457.967.915	269.842.329.685	264.457.967.915	190.189.913.885	259.014.477.697	255.756.734.924	259.014.477.697	255.756.734.924	95	97	97	97	97	5,99%	6,72%

2.4. Tantangan dan Peluang

Faktor-faktor yang merupakan tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan antara lain :

1) Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas.
2) Beban pembiayaan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi khususnya masyrakat miskin
3) Kondisi lingkungan perumahan yang tidak sehat dan perubahan musim yang dapat menimbulkan potensi timbulnya atau meluasnya penyakit menular, dan atau bencana yang dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
4) Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan;
5) Adanya krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan khususnya pogram kesehatan ibu, anak dan gizi;
6) Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sistem / prosedur pelayanan kesehatan, sikap petugas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sarana kesehatan milik Pemerintah.
7) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor karena adanya egoisme dan pola pikir sektoral diantara pihak-pihak yang berkoordinasi dan belum berfungsinya secara maksimal Tim Kooordinasi atau pokja - pokja yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Sedangkan factor-faktor yang merupakan peluang dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain:

1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Malang terhadap upaya program pembangunan kesehatan;
2. Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program dan lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan;
3. Adanya implementasi Otonomi daerah termasuk bidang kesehatan yang memberikan peluang kepada Dinas Kesehatan untuk mengelola program pembangunan kesehatan mulai

perencanaan sampai evaluasi / penilaian sesuai dengan kondisi daerah.

4. Lebih terbukanya peluang dukungan dana untuk pelaksanaan program kesehatan termasuk untuk program - program sosialisasi sepanjang ada konsep yang jelas dan rasional;
5. Adanya potensi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;
6. Adanya Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Faktor-faktor yang merupakan permasalahan dalam melaksanakan program kesehatan antara lain:

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup (30 Ibu meninggal) pada tahun 2015, dan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup (247 Bayi meninggal) pada tahun 2015;
2. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dengan Prevalensi Balita Gizi Buruk 5,89% (9.996 Balita);
3. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif dari target 80%, tahun 2015 : 64,92%;
4. Biaya pemeriksaan layanan HIV-AIDS dan IMS bagi sasaran program belum diatur dalam Peraturan Daerah maupun BPJS kesehatan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
5. Masih tingginya angka kejadian tuberkulosis (kasus baru TB) BTA Positif usia di atas 15 tahun per 100.000 penduduk hasil survey prevalensi tahun 2013 sebesar 257 Per 100.000 penduduk dibanding tahun 2007 107 per 100.000 penduduk;
6. Masih belum semua kasus TB terdeteksi dalam program DOTS tercapai 35% dari target 70% Tahun 2015;
7. Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;
8. Masih banyak beredar makanan, dan makanan jajanan anak sekolah yang tidak aman akibat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P);
9. Pelaksanaan Pembagunan Kesehatan mengedapankan pendekatan Pembangunan Berbasis Desa melalui Desa Siaga perlu peningkatan meliputi peningkatan kwantitas dan kwalitas UKBM Desa siaga, Posyandu, dan lainnya yang belum berjalan optmal, Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan kesehatan masih rendah, pembangunan selama ini masih pada pembangunan kesehatan bebasis sektoral dan sedikit melibatkan masyarakat, sehingga pembangunan sulit dicapai tanpa dukungan peran serta masyarakat;
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Program JKN BPJS Kesehatan belum mencapai progres yang signifikan;

11. Akses air minum masyarakat masih dibawah 70% akibat Sumber air bersih yang didistribusikan badan pengelola air bersih desa ke masyarakat banyak yang belum dilindungi dari resiko pencemaran. Sehingga masyarakat masih belum mendapatkan akses air bersih memenuhi syarat kesehatan;
12. Ketersediaan Petugas kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti pansiun.
13. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP-I) masih belum terakreditasi;
14. Dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang masih 10 Puskesmas dengan pengelolaan BLUD Unit Kerja;
15. Dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang masih 6 Puskesmas dengan Standar ISO 9001:2015;
16. Belum adanya Unit Pengelolaan Limbah di Kabupaten Malang;
17. Unit Kalibrasi Alat Kesehatan di Kabupaten Malang masih baru perlu pembenahan dan perbaikan;
18. UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang belum terareditasi.
19. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Malang;
20. Belum adanya pengembangan pelayanan obat tradisional di Puskesmas.
21. Adanya perangkapan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dengan tugas pokok dan fungsi yang lain karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga terutama yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan proses manajemen kesehatan;
22. Adanya petugas yang berstatus pegawai tidak tetap (dokter / bidan di desa) sehingga mengurangi motivasi kerja;
23. Adanya disparitas pelayanan kesehatan, perencanaan kesehatan, pencapaian program meliputi SPM dan MDGs.
24. Masih adanya pemberian pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan standart pelayanan, oleh karena rendahnya tingkat kepatuhan sebagian petugas terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP);
25. Lemahnya pelaksanaan “ Reward and Punishment “ dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan dan jaringannya;
26. Masih adanya petugas yang tidak berdomisili diwilayah kerja.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Malang periode 2016-2021 adalah ”MADEP MANTEB MANETEB”.

Dilihat dari Visi Kabupaten Malang tersebut, dari bidang kesehatan yang berkaitan erat dengan tupoksi Bidang Kesehatan yaitu ***”MANETEB” yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia*** strategi diarahkan pada penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. A dapun p embangunan manusia mempunyai empat elemen yaitu produktifitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan , kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Kemudian Misi 3 RPJMD Kabupaten Malang yang mempunyai kaitan erat dan juga menjadi tupoksi Dinas Kesehatan adalah **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatan Indeks Pembangunan Manusia** dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang kesehatan. Dengan semakin meningkatnya indeks kesehatan masyarakat dapat menggambarkan juga semakin produktif dan semakin masyarakat mempunyai tingkat daya saing yang tinggi.

Faktor- faktor kendala yang dapat mempengaruhi visi misi Kabupaten Malang adalah beban pembiayaan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi khususnya masyrakat miskin, kondisi lingkungan perumahan yang tidak sehat dan perubahan musim yang dapat menimbulkan potensi timbulnya atau meluasnya penyakit menular, dan atau bencana yang

dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan;

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua Tujuan pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, yaitu: 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Dilihat dari Tujuan yang ada pada Renstra Kemetrain Kesehatan tersebut, sudah sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mana Tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan sejumlah enam Tujuan semuanya mendukung Tujuan Renstra Kementrian Kesehatan yaitu 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap atau daya saing,

Kendala yang mungkin terjadi adalah Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, khususnya pembiayaan masyarakat miskin, yang ternyata juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tercakup oleh pembiayaan pusat, kemudian bantuan operasional kesehatan, khususnya terkait dengan rencana pendapatan daerah bidang kesehatan. Sedangkan kendala lain adalah pembiayaan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan atau APBN yang sudah teralokasikan kegiatannya, sehingga Kabupaten tidak bisa mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan permasalahan daerah. Namun demikian anggaran yang turun

dari kementerian kesehatan tentunya juga sebagai pendorong dalam pembangunan kesehatan di daerah.

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Kementerian Kesehatan	1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan 2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai 3. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu 4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat	1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan 3. Pernebitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan e-renggar 5. Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK. 6. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten	1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan 2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum 3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat . Secara mikro, semua kebijakan pembangunan kesehatan yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Didalam kerangka ini perlu dilakukan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Keningkatan Kesehatan Lingkungan Khususnya lingkungan pemukiman penduduk. Sebagai pendorong dalam hal ini adalah terlibatnya semua sektor yang lain dalam mendukung peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan program-programnya. Sedangkan kendala yang mungkin terjadi adalah penebangan, pembabatan hutan atau penjarahan yang tidak teratur dan terarah akan mengakibatkan ekosistem makhluk hidup berubah yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan manusia sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia dan dapat menimbulkan penyakit yang dulunya sudah berkurang atau tidak ada menjadi meningkat atau muncul kembali.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk lima tahun mendatang adalah:

1. **Adanya 9 Agenda Prioritas (NAWA CITA)**, Agenda ke 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
2. **PEMERATAAN PELAYANAN**

   Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan yang **berkualitas dalam kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkeadilan**
2. **KUALITAS PELAYANAN**

   Keterjangkauan Kualitas pelayanan kesehatan pada semua jenjang pelayanan baik pemerintah atau swasta dalam mendukung pencapaian program-program kesehatan.

3. **PEMBIAYAAN KESEHATAN**

   Dukungan **Peraturan Perundangan bidang kesehatan** khususnya dalam meningkatkan pembiayaan kesehatan khususnya masyarakat miskin

4. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

   Promosi dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam mendukung **kemandirian masyarakat** untuk hidup sehat dan produktif.

5. **SANITASI LINGKUNGAN**

   Kualitas Lingkungan Perumahan dan Tempat-Tempat Umum yang berpotensi terhadap timbulnya kasus penyakit menular.

6. **INFORMASI KESEHATAN**

   Sistem Informasi Kesehatan dan surveilans epidemiologi penyakit berbasis masyarakat.

7. **KUALITAS SUMBER DAYA**

   Peningkatan Sumber Daya Kesehatan yang merata dan berkeadilan di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi , tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang yang mempunyai makna :

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir renstra.
2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ialah untuk mendukung Misi Nomor 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang dengan Tujuan Nomor 1 yaitu **" Meningkatkan daya saing daerah "** dengan Sasaran Nomor 1 Yaitu **" Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan"** dengan Indikator Sasaran Nomor 1 Yaitu : **" Indeks pembangunan manusia "**

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Misi Kabupaten Malang menetapkan tujuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2021, sebelum perubahan tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan sebanyak 10 (sepuluh) tujuan setelah dilakukan perubahan Renstra tujuan yang tertuang dalam Renstra menjadi 6 (enam) Tujuan dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.1. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi
4.1.1.2. Meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan
4.1.1.3. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
4.1.1.4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan di desa.

4.1.1.5. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan target kasus masing-masing.

4.1.1.6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan minuman dari bahan berbahaya.

Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi tersebut melalui :

1) Meningkatkan Jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan.
2) Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan
4) Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini Bidang Kesehatan
5) Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6) Meningkatkan pengembangan sumber daya kesehatan
7) Meningkatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan.

Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa

tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berdasar makna sasaran diatas maka Dinas Kesehatan menetapkan Sasaran pada perubahan Renstra tahun 2016 – 2021 sejumlah 6 (enam) sasaran dengan indicator sasaran sebanyak 8 (delapan) sebagai berikut :

Tujuan 1 yaitu Meningkatkan kualitas manajeman organisasi dengan **Sasaran** Meningkatnya kualitas manajemen organisasi, yang terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran :

1.1. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerjas instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan **Sasaran** Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran .

1.2. Indek Kepuasan Masuarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.

1.3. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)

Tujuan 3 yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak dengan **Sasaran** Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran :

3.1. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH. dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.

3.2. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Tujuan 4 yaitu Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan di desa dengan **Sasaran** Meningkatnya Desa yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan, yang terdiri dari dua indicator sasaran :

4.1. Persentase desa siaga aktif Puri (Purnama, Mandiri)

Tujuan 5 yaitu Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan target kasus masing-masing dengan **Sasaran** Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, yang terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran:

5.1. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan < 24 jam

Tujuan 6 yaitu Meningkatkan pengawasan obat dan makanan minuman dari bahan berbahaya dengan **Sasaran** Pengawasan obat , makanan minuman dan obat tradisional, yang terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran.

6.1. Persentase penurunan obat dan makanan yang berbahaya.

Berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang serta berdasar uraian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tersebut diatas, maka dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Program Prioritas Penurunan Angka Kemiskinan didukung oleh :
   - Tujuan 2 (dua) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
   - Tujuan 3 yaitu Meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak dengan Sasaran menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian anak.
   - Tujuan 5 yaitu Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan target kasus masing-masing dengan Sasaran Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
2. Program Prioritas Optimalisasi Pariwisata di dukung oleh :
   - Tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan kualitas manajeman organisasi dengan Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen organisasi.
   - Tujuan 6 (enam) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan minuman dari bahan berbahaya dengan Sasaran Pengawasan obat , makanan minuman dan obat tradisional.
3. Program Prioritas Lingkungan Hidup di dukung oleh :
   - Tujuan 3 (tiga) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan di desa dengan Sasaran Meningkatnya Desa yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, yang salah satunya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mana IKU tersebut merupakan Indikator yang dianggap Utama dari indicator – indicator sasaran yang ada. Dengan akan ditetapkannya IKU baru berdasarkan Reviu RPJMD Tahun 2016 – 2021, dan adanya perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 maka IKU Dinas Kesehatan berubah terdiri dari 3 (tiga) Kinerja Utama dengan indicator kinerja utama sebanyak 5 indikator, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas	Total nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x nilai penimbang x 25	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Bidang Pelayanan Kesehatan
		2. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)	Jumlah Maskin yang mendapat pelayanan / Jumlah Maskin yang sakit X 100%	Laporan tahunan seksi pengawasan makanan dan minuman dinkes	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tujuan 3. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)	3. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.	Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas / Jumlah kelahiran hidup X 100.000 KH	Laporan SP2TP (Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Jumlah kematian bayi / kelahiran hidup X 1000 KH	sda	sda
		4. Prevalensi balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan / Jumlah balita X 100%.	Hasil survey Pemantauan status gizi (PSG).	Bidang Kesehatan Masyarakat

Tujuan 5 : Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan target kasus masing-masing.				
KINERJA UTAMA	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**FORMULA / PENJELASAN**	**SUMBER DATA**	**PENANGGUNG JAWAB**
Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	**5. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan < 24 jam**	**Penanganan KLB di desa/kelurahan <24 jam dalam periode tertentu** ——————————— **X 100%** **Jumlah KLB di desa/kelurahan pada periode yang sama**	**Laporan SP2TP (Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas)**	**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

TABEL : 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 - 2021

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET INDIKATOR KINERJA				AKHIR PERIODE RENSTRA
										2018	2019	2020	2021	
1	**Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**	**Angka Usia Harapan Hidup**				***72,01**	**72,15**	**72,30**	**72,45**	**72,60**	**72,60**
						1. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola dan persentase kinerja aparatur yang dikelola	Jumlah administrasi umum dan kinerja aparatur yang dikelola dengan baik dan benar dibagi jumlah administrasi umum dan kinerja aparatur kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Total nilai persepsi per unsur di bagi Total unsur yang terisi x nilai penimbang x 25	76,46	75,5	76	76,5	O	77
						3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi(AKB)	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup X 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH
							Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi di bagi kelahiran hidup X 1000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang diarahkan untuk meningkatkan jangkauan akses kemudahan dan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berkeadilan dan mandiri dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan, status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, ras, gender dan status sosial/ekonomi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan.

Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Di samping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB) Penyakit, penanggulangan masalah gizi pada balita dan ibu, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang mempunyai komitmen regional dan global mendapat pengutamaan, dan penanganan secara kewilayahan, tanpa mengabaikan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa melalui kerjasama lintas sektor, dan masyarakat termasuk swasta. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) khususnya Puskesmas, harus mampu memberikan pelayanan dasar yang bermutu yang diperlukan oleh masyarakat.

b. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang, diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi daerah. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.

Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya.

c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta

Dalam era reformasi, masyarakat dan swasta harus didorong agar dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat dan swasta agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalam rangka mewujudkan ”Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Pengembangan Desa Siaga harus melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Keberhasilan Desa Siaga ditandai oleh antara lain berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, keluarga berencana, perawatan kehamilan dan pertolongan persalinan, gizi, dan penanganan kedaruratan kesehatan.

d. Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Agar pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu serta berakhlak baik. Dalam pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, Dinas Kesehatan melaksanakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan dalam lingkup Kabupaten Malang, dan dilakukan melalui perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang mendasarkan pada pendekatan beban fungsi dan standar kebutuhan minimal kebutuhan tenaga kesehatan menurut jenisnya di tiap unit pelayanan secara terintegrasi, dan terpadu, serta pendayagunaannya yang adil dan merata.

Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan dilakukan melalui pemantapan kerja sama lintas sektor dan peran aktif masyarakat dan swasta. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan juga diarahkan agar mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi globalisasi yang merupakan tantangan sekaligus peluang pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang.

e. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan Khususnya Masyarakat Miskin

Di bidang penganggaran dan pembiayaan pembangunan kesehatan, maka guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta, dalam upaya menggalang sumber-sumber pembiayaan kesehatan, sehingga dapat tersedia pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersumber APBD (DAU), APBD I, APBN, dan Bantuan Luar Negeri (BLN). Anggaran ini di samping dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan pembangunan kesehatan, juga diarahkan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, membantu dalam penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, peningkatan surveilans dan penanggulangan penyakit menular dan gangguan gizi.

Di bidang logistik kesehatan, untuk menjamin sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan perencanaan dan pengadaan dalam penyediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan mengupayakan pula menjamin tersedianya *"buffer stock"* obat sangat essensial, dan kebutuhan obat untuk penanggulangan bencana, serta obat program pemberantasan penyakit menular dan perbaikan gizi. Tersedianya Obat Pelayanan Kesehatan dasar minimal 90 %

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menetapkan program operasional organisasi yang mana sebelum perubahan Renstra jumlah program sebanyak 20 (dua puluh) dengan kegiatan sebanyak 117 (seratus tujuh belas), setelah adanya perubahan Renstra jumlah Program menjadi 12 (dua belas) dengan kegiatan sejumlah 96 (sembilan puluh enam), sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat tulis kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Daerah
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Puskesmas BLUD

- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang
- Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen

6. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD

- Operasional dan pemeliharaan Puskesmas
- Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK - DAK)
- Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dampit
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dau
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Donomulyo
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gondanglegi
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kasembon
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kepanjen
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Singosari
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sumberpucung
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tumpang
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Turen
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes
- Layanan Labolatorium Kesehatan
- Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

7. Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan

- Perencanaan , evaluasi, pelaporan dan informasi kesehatan

8. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Peningkatan kesehatan keluarga.
- Penyelenggaraan Jampersal (DAK)
- Upaya Penanggulangan Gizi
- Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Pengembangan lingkungan sehat, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,
- Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa

10. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Primer.
- Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
- Pelayanan Kesehatan Tradisional

11. Program Sumber Daya Kesehatan

- Penyediaan Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman (APBD II & DAK)
- Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)
- Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan

12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- Pengembangan Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT)

1.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Rencana indikator kinerja dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)

Tahun mendatang diharapkan dapat mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Malang tahun 2016 - 2021, adapun rencana kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**Usia Harapan Hidup**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel**	**Persentase administrasi umum yang dikelola dan persentase kinerja aparatur yang dikelola**				**5.838.079.408**			**10.471.609.017**		**9.521.859.500**		**9.575.123.000**		**9.668.758.000**		**45.075.428.925**	
		INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)			**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)**	**100%**	**2.448.035.668**		**100%**	**2.915.682.000**	**100%**	**2.729.079.500**	**100%**	**2.780.238.000**	**100%**	**2.869.473.000**	**100%**	**13.742.508.168**	**Sekretariat**
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8778 surat	31.200.000	APBD Kabupaten	9000 surat	40.000.000	9000 surat	42.000.000	9000 surat	44.000.000	9000 surat	48.400.000	27000 surat	205.600.000	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	373.163.308	APBD Kabupaten	12 bulan	288.750.000	12 bulan	303.187.500	12 bulan	318.346.000	12 bulan	350.181.000	36 bulan	1.633.627.808	
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	70 org	1.248.880.000	APBD Kabupaten	87 org	1.536.892.000	87 org	1.536.892.000	87 org	1.536.892.000	87 org	1.536.892.000	261 org	7.396.448.000	
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 orang	15.000.000	APBD Kabupaten	1 orang	15.960.000	1 orang	18.000.000	1 orang	20.000.000	1 orang	22.000.000	3 orang	90.960.000	
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	46 jenis	84.289.050	APBD Kabupaten	46 jenis	90.000.000	46 jenis	94.000.000	46 jenis	98.000.000	46 jenis	100.000.000	46 jenis	466.289.050	
					6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	21 jenis	123.223.550	APBD Kabupaten	21 jenis	125.000.000	21 jenis	125.000.000	21 jenis	125.000.000	21 jenis	125.000.000	21 jenis	623.223.550	
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 jenis	8.905.000	APBD Kabupaten	12 jenis	10.000.000	12 jenis	15.000.000	12 jenis	20.000.000	12 jenis	22.000.000	36 jenis	75.905.000	
					8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 macam	10.660.000	APBD Kabupaten	4 macam	15.000.000	4 macam	15.000.000	4 macam	15.000.000	4 macam	15.000.000	12 macam	70.660.000	
					9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2500 kotak	65.200.000	APBD Kabupaten	3000 kotak	94.140.000	3200 kotak	70.000.000	3200 kotak	70.000.000	3500 kotak	80.000.000	9900 kotak	379.340.000	
					10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	448 OK	249.914.760	APBD Kabupaten	468 OK	400.000.000	488 OK	260.000.000	508 OK	273.000.000	508 OK	300.000.000	1504 OK	1.482.914.760	
					11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	855 OK	237.600.000	APBD Kabupaten	865 OK	299.940.000	885 OK	250.000.000	905 OK	260.000.000	905 OK	270.000.000	2695 OK	1.317.540.000	
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)**	**100%**	**1.633.438.241**		**100%**	**3.227.344.300**	**100%**	**2.911.895.000**	**100%**	**2.914.000.000**	**100%**	**2.918.400.000**	**100%**	**13.605.077.541**	**Sekretariat**
					12. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	1 Lokasi	214.745.000	Pajak Rokok	1 Lokasi	1.591.870.000	1 Lokasi	1.600.000.000	1 Lokasi	1.600.000.000	1 Lokasi	1.600.000.000	3 Lokasi	6.606.615.000	
					13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	6 jenis	224.040.000	Pajak Rokok	18 jenis	415.300.000	6 jenis	400.000.000	6 jenis	400.000.000	6 jenis	400.000.000	18 jenis	1.839.340.000	
					14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 jenis	435.905.641	Pajak Rokok	8 jenis	513.400.000	8 jenis	400.000.000	8 jenis	400.000.000	8 jenis	400.000.000	24 jenis	2.149.305.641	
					15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 lokasi	49.347.000	APBD Kabupaten	1 lokasi	86.949.000	1 lokasi	80.000.000	1 lokasi	80.000.000	1 lokasi	80.000.000	3 lokasi	376.296.000	
					16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	20 unit	84.999.600	APBD Kabupaten	20 unit	162.375.300	20 unit	170.000.000	20 unit	170.000.000	20 unit	170.000.000	20 unit	757.374.900	
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	38.000.000	APBD Kabupaten	4 jenis	20.000.000	4 jenis	41.895.000	4 jenis	44.000.000	4 jenis	48.400.000	12 jenis	192.295.000	
					18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	2 Lokasi	586.401.000	APBD Kabupaten	2 Lokasi	437.450.000	1 Lokasi	220.000.000	1 Lokasi	220.000.000	1 Lokasi	220.000.000	3 Lokasi	1.683.851.000	
					III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**241.044.500**		**100%**	**852.385.000**	**100%**	**295.000.000**	**100%**	**295.000.000**	**100%**	**295.000.000**	**100%**	**1.978.429.500**	**Sekretariat**

					19. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	2 orang	71.854.500	APBD Kabupaten	2 orang	116.185.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	6 orang	248.039.500	
					20. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	100 orang	19.285.000	APBD Kabupaten	100 orang	22.580.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	300 orang	116.865.000	
					21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	2 Perda	149.905.000	APBD Kabupaten	2 Perda	713.620.000	2 Perda	250.000.000	2 Perda	250.000.000	2 Perda	250.000.000	6 Perda	1.613.525.000	
					IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)**	**100%**	**197.513.500**		**100%**	**1.224.432.717**	**100%**	**1.328.107.500**	**100%**	**1.328.107.500**	**100%**	**1.328.107.500**	**100%**	**5.406.268.717**	**Sekretariat**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Jenis Dok	66.625.000	APBD Kabupaten	17 Jenis Dok	126.325.217	17 Jenis Dok	130.000.000	17 Jenis Dok	130.000.000	17 Jenis Dok	130.000.000	17 Jenis Dok	582.950.217	
					23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Dok	72.993.500	APBD Kabupaten	1 Dok	67.940.000	0 Dok	100.000.000	0 Dok	100.000.000	0 Dok	100.000.000	0 Dok	440.933.500	
					24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dok	57.895.000	APBD Kabupaten	1 Dok	1.030.167.500	1 Dok	830.167.500	1 Dok	830.167.500	1 Dok	830.167.500	1 Dok	3.578.565.000	
					25. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	0 Jenis Lap.	0	APBD Kabupaten	0 Jenis Lap.	0	8 Jenis Lap.	267.940.000	8 Jenis Lap.	267.940.000	8 Jenis Lap.	267.940.000	24 Jenis Lap.	803.820.000	
					V. Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan	**Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan**	**100%**	**1.318.047.499**		**100%**	**2.251.765.000**	**100%**	**2.257.777.500**	**100%**	**2.257.777.500**	**100%**	**2.257.777.500**	**100%**	**10.343.144.999**	**Sekretariat**
					26. Penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan kesehatan			**1.318.047.499**			**2.251.765.000**		**2.257.777.500**		**2.257.777.500**		**2.257.777.500**		**10.343.144.999**	
						Penyusunan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	17 Dok	7.043.674	APBD Kabupaten	17 Dok	7.560.000	17 Dok	7.560.000	17 Dok	7.560.000	17 Dok	7.560.000	17 Dok	37.283.674	
						Jumlah Refresing peningkatan managemen perencanaan Puskesmas	0 kali	0	APBD Kabupaten	3 kali	837.100.000	3 kali	837.100.000	3 kali	837.100.000	3 kali	837.100.000	9 kali	3.348.400.000	
						Jumlah pengadaan sofware sistem informasi kesehatan (SIK)	2 jenis	167.706.524	APBD Kabupaten	2 jenis	180.000.000	2 jenis	180.000.000	2 jenis	180.000.000	2 jenis	180.000.000	6 jenis	887.706.524	
						Jumlah penggandaan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	243 buku	26.078.365	APBD Kabupaten	243 buku	27.990.000	243 buku	30.000.000	243 buku	30.000.000	243 buku	30.000.000	729 buku	144.068.365	
						Jumlah Rakerkes dalam rangka perumuskan perencanaan, evaluasi program kesehatan	1 kali	152.796.948	APBD Kabupaten	1 kali	163.997.500	1 kali	168.000.000	1 kali	168.000.000	1 kali	168.000.000	3 kali	820.794.448	
						Jumlah penyelenggaraan /pengadaan peningkatan mutu manajemen Puskesmas (ISO)	4 Jenis	383.749.795	APBD Kabupaten	4 Jenis	411.880.000	4 Jenis	411.880.000	4 Jenis	411.880.000	4 Jenis	411.880.000	4 Jenis	2.031.269.795	
						Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait perencanaan , evaluasi dan pengolahan data	4 kali	74.387.160	APBD Kabupaten	4 kali	79.840.000	4 kali	79.840.000	4 kali	79.840.000	4 kali	79.840.000	12 kali	393.747.160	
						Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengeloaan data program kesehatan .	18 kali	352.554.053	APBD Kabupaten	18 kali	378.397.500	18 kali	378.397.500	18 kali	378.397.500	18 kali	378.397.500	54 kali	1.866.144.053	
						Jumlah pemeliharaan aplikasi (sofware) revapor	2 jenis	153.730.980	APBD Kabupaten	2 jenis	165.000.000	2 jenis	165.000.000	2 jenis	165.000.000	2 jenis	165.000.000	6 jenis	813.730.980	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan**				**159.926.028.750**			**142.251.227.359**		**##############**		**176.852.486.062**		**181.572.810.212**		**829.770.686.360**	
					VI. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD	**Persentase UPT / UPTD menerima biaya jasa sarana dan operasional**	**0%**	**82.236.417.809**		**100%**	**79.597.932.259**	**100%**	**58.107.442.000**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**219.941.792.068**	**Sekretariat**
					27. Operasional dan pemeliharaan Puskesmas (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 jenis	11.588.542.952	APBD Kabupaten	2 jenis	11.814.527.400	2 jenis	12.000.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	35.403.070.352	
					28. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading	2 jenis	1.399.957.084	APBD Kabupaten	2 jenis	1.303.958.400	2 jenis	1.229.220.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.933.135.484	
					29. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardimulyo	2 jenis	1.231.137.881	APBD Kabupaten	2 jenis	1.185.893.000	2 jenis	1.185.893.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.602.923.881	
					30. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bantur	2 jenis	1.180.592.847	APBD Kabupaten	2 jenis	1.133.342.250	2 jenis	1.332.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.645.935.097	
					31. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bululawang	2 jenis	2.380.603.102	APBD Kabupaten	2 jenis	2.117.460.000	2 jenis	2.117.460.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.615.523.102	
					32. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gedangan	2 jenis	1.705.609.283	APBD Kabupaten	2 jenis	1.790.000.000	2 jenis	1.560.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.055.609.283	
					33. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Jabung	2 jenis	1.911.298.083	APBD Kabupaten	2 jenis	1.953.600.000	2 jenis	1.732.316.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.597.214.083	
					34. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kalipare	2 jenis	1.770.029.898	APBD Kabupaten	2 jenis	1.792.800.000	2 jenis	1.280.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.842.829.898	
					35. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Karangploso	2 jenis	2.077.619.816	APBD Kabupaten	2 jenis	1.978.936.000	2 jenis	1.978.936.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.035.491.816	
					36. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ketawang	2 jenis	1.014.225.559	APBD Kabupaten	2 jenis	1.160.000.000	2 jenis	902.389.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.076.614.559	
					37. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kromengan	2 jenis	932.704.948	APBD Kabupaten	2 jenis	823.381.200	2 jenis	756.150.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	2.512.236.148	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					38. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Lawang	2 jenis	2.027.709.668	APBD Kabupaten	2 jenis	1.944.000.000	2 jenis	1.944.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.915.709.668	
					39. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngajum	2 jenis	1.754.704.575	APBD Kabupaten	2 jenis	1.645.551.000	2 jenis	1.664.508.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.064.763.575	
					40. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngantang	2 jenis	2.033.657.142	APBD Kabupaten	2 jenis	1.843.200.000	2 jenis	1.944.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.820.857.142	
					41. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagak	2 jenis	858.835.005	APBD Kabupaten	2 jenis	816.000.000	2 jenis	846.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	2.520.835.005	
					42. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagelaran	2 jenis	2.015.054.376	APBD Kabupaten	2 jenis	1.649.640.000	2 jenis	1.900.440.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.565.134.376	
					43. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakis	2 jenis	3.176.281.574	APBD Kabupaten	2 jenis	2.984.764.300	2 jenis	3.024.000.000	2 jenis	0	2 jenis	0	2 jenis	9.185.045.874	
					44. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakisaji	2 jenis	2.553.441.454	APBD Kabupaten	2 jenis	2.215.954.800	2 jenis	1.858.068.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.627.464.254	
					45. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pamotan	2 jenis	1.490.750.448	APBD Kabupaten	2 jenis	1.506.000.000	2 jenis	1.488.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.484.750.448	
					46. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Poncokusumo	2 jenis	3.534.142.837	APBD Kabupaten	2 jenis	3.826.175.276	2 jenis	2.880.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	10.240.318.113	
					47. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pujon	2 jenis	2.059.806.750	APBD Kabupaten	2 jenis	2.075.749.000	2 jenis	2.075.749.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.211.304.750	
					48. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Sitiarjo	2 jenis	993.437.023	APBD Kabupaten	2 jenis	923.638.700	2 jenis	910.980.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	2.828.055.723	
					49. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingKulon	2 jenis	438.751.373	APBD Kabupaten	2 jenis	444.894.600	2 jenis	372.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	1.255.645.973	
					50. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingWetan	2 jenis	1.444.382.379	APBD Kabupaten	2 jenis	1.440.000.000	2 jenis	1.409.400.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.293.782.379	
					51. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tajinan	2 jenis	1.564.152.503	APBD Kabupaten	2 jenis	1.460.000.000	2 jenis	1.353.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.377.152.503	
					52. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tirtoyudo	2 jenis	1.824.046.035	APBD Kabupaten	2 jenis	1.780.560.000	2 jenis	1.780.560.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.385.166.035	
					53. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wagir	2 jenis	1.876.653.382	APBD Kabupaten	2 jenis	1.800.000.000	2 jenis	1.800.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	5.476.653.382	
					54. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wajak	2 jenis	2.513.591.564	APBD Kabupaten	2 jenis	2.280.000.000	2 jenis	2.075.975.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.869.566.564	
					55. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonokerto	2 jenis	974.115.585	APBD Kabupaten	2 jenis	1.127.232.000	2 jenis	900.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.001.347.585	
					56. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonosari	2 jenis	1.237.625.267	APBD Kabupaten	2 jenis	1.220.328.000	2 jenis	1.220.328.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.678.281.267	
					57. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana BP Yankes	2 jenis	125.838.652	APBD Kabupaten	2 jenis	134.275.200	2 jenis	137.520.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	397.633.852	
					58. Layanan Labolatorium Kesehatan			30.000.000			270.000.000		270.000.000		0		0		570.000.000	
						Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk medukung operasional laboratorium	1 kali	555.556	APBD Kabupaten	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	10.555.556	
						Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat laboratorium	1 kali	3.122.222	APBD Kabupaten	1 kali	28.100.000	1 kali	20.000.000	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	51.222.222	
						Pemamtapan Mutu Eksternal	2 klai	388.889	APBD Kabupaten	2 klai	3.500.000	2 klai	10.000.000	0 klai	0	0 klai	0	2 klai	13.888.889	
						Persiapan akreditasi	1 kali	16.666.667	DAK	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	316.666.667	
						Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	2 kali	2.037.778	APBD Kabupaten	2 kali	18.340.000	2 kali	10.000.000	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	30.377.778	
						Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	15 jenis	5.024.444	APBD Kabupaten	15 jenis	45.220.000	15 jenis	60.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	15 jenis	110.244.444	
						Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	2 kali	2.204.444	APBD Kabupaten	2 kali	19.840.000	2 kali	15.000.000	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	37.044.444	
					59. Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan			180.469.999			136.785.000		178.550.000		0		0		495.804.999	
						Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes keluar daerah .	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	6 kali	8.400.000	0 kali	0	0 kali	0	6 kali	8.400.000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Jumlah pendampingan BPFK dalam rangka Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	2 kali	1.913.086	APBD Kabupaten	2 kali	1.450.000	2 kali	3.000.000	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	6.363.086	
						Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka monitoring kalibrasi.	54 Fasyankes	39.825.178	APBD Kabupaten	54 Fasyankes	30.185.000	80 Fasyankes	45.000.000	0 Fasyankes	0	0 Fasyankes	0	80 Fasyankes	115.010.178	
						Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes.	6 paket	39.581.094	APBD Kabupaten	5 paket	30.000.000	1 paket	36.000.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	105.581.094	
						Jumlah konsultasi ke BPFK dalam rangka konsultasi pengujian dan kalibrasi .	25 kali	27.884.881	APBD Kabupaten	25 kali	21.135.000	6 kali	5.150.000	0 kali	0	0 kali	0	6 kali	54.169.881	
						Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang dikalibrasikan ke BPFK/Intitusi Penguji dan Kalibrasi alkes	6 unit	5.317.060	APBD Kabupaten	6 unit	4.030.000	11 unit	46.000.000	0 unit	0	0 unit	0	11 unit	55.347.060	
						Jumlah operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat kesehatan	15 Jenis	65.948.700	APBD Kabupaten	15 Jenis	49.985.000	1 Jenis	35.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	150.933.700	
					60. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dampit	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Dampit	2 Jenis	1.815.308.770	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.799.096.133	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	3.614.404.903	
					61. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dau	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Dau	2 Jenis	1.815.308.770	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.270.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	3.085.308.770	
					62. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Donomulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Donomulyo	2 Jenis	2.319.117.633	APBD Kabupaten	2 Jenis	2.122.590.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	4.441.707.633	
					63. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gondanglegi	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gondanglegi	2 Jenis	1.651.315.885	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.560.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	3.211.315.885	
					64. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kasembon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kasembon	2 Jenis	1.389.798.864	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.402.200.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	2.791.998.864	
					65. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kepanjen	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kepanjen	2 Jenis	2.503.347.708	APBD Kabupaten	2 Jenis	2.280.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	4.783.347.708	
					66. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Singosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Singosari	2 Jenis	1.889.977.504	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.950.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	3.839.977.504	
					67. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sumberpucung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Sumberpucung	2 Jenis	1.557.084.322	APBD Kabupaten	2 Jenis	1.356.600.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	2.913.684.322	
					68. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tumpang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tumpang	2 Jenis	2.840.681.759	APBD Kabupaten	2 Jenis	2.686.800.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	5.527.481.759	
					69. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Turen	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Turen	2 Jenis	2.554.707.550	APBD Kabupaten	2 Jenis	2.592.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	5.146.707.550	
					VII. Program Sumber Daya Kesehatan	**Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akriditasi**	**0%**	**52.135.241.110**		**100%**	**35.409.222.145**	**100%**	**56.724.605.000**	**100%**	**62.405.357.500**	**100%**	**64.449.137.750**	**100%**	**271.123.563.505**	**Bidang SDK**
						Persentase stok obat indikator 20 item	**0%**			**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		
						Persentase IRTP yang bersertifikat	**0%**			**82%**		**83%**		**84%**		**85%**		**85%**		
						Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT	**0%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
					DATA YANG MELL SERTIFIKASI / PELATIHAN	**Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih**	**0%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
					70. Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)			35.256.818.105			20.840.041.645		38.798.500.000		43.628.500.000		43.928.500.000		182.452.359.750	
						Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes (Pajak rokok)	36 lokasi	12.030.947.000	Pajak Rokok	36 lokasi	8.021.569.600	33 lokasi	12.500.000.000	33 lokasi	12.500.000.000	33 lokasi	12.500.000.000	99 lokasi	57.552.516.600	
						Jumlah lokasi Penambahan Ruangan/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	4 lokasi	4.849.977.000	DAK	4 lokasi	3.940.451.000	7 lokasi	7.000.000.000	7 lokasi	7.000.000.000	7 lokasi	7.000.000.000	21 lokasi	29.790.428.000	
						Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	0 set	0	DAK	0 set	0	2 set	400.000.000	1 set	200.000.000	1 set	200.000.000	4 set	800.000.000	
						Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)	0 lokasi	0	DAK	1 lokasi	2.000.000.000	1 lokasi	200.000.000	1 lokasi	200.000.000	1 lokasi	500.000.000	3 lokasi	2.900.000.000	
						Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke Provinsi	6 kali	16.800.000	APBD Kabupaten	6 kali	16.800.000	2 kali	3.000.000	2 kali	3.500.000	2 kali	3.500.000	6 kali	43.600.000	
						Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan PKRT	4 kali	75.262.250	APBD Kabupaten	4 kali	43.960.000	5 kali	79.000.000	5 kali	93.000.000	5 kali	93.000.000	15 kali	384.222.250	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes Puskesmas, Klinik dan RS	3 kali	75.262.250	APBD Provinsi	2 kali	60.370.000	3 kali	89.500.000	3 kali	104.000.000	3 kali	104.000.000	9 kali	433.132.250	
						Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	39 set	18.196.061.605	Pajak Rokok	39 set	6.738.641.045	39 set	18.500.000.000	39 set	18.500.000.000	39 set	18.500.000.000	117 set	80.434.702.650	
						Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur Alkes/PKRT yang diawasi	25 sarana	12.508.000	APBD Kabupaten	25 sarana	18.250.000	30 sarana	27.000.000	30 sarana	28.000.000	30 sarana	28.000.000	90 sarana	113.758.000	
						Jumlah lokasi Pembangunan Puskesmas / Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas (DAK)	0 lokasi	0	DAK	0 lokasi	0	0 lokasi	0	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	2 lokasi	10.000.000.000	
					71. Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan			400.000.000			1.191.535.000		421.055.000		424.055.000		426.055.000		2.862.700.000	
						Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan dan perencanaan kebutuhan SDMKes	7 kali	27.196.851	APBD Kabupaten	7 kali	81.015.000	7 kali	81.275.000	7 kali	81.275.000	7 kali	81.275.000	21 kali	352.036.851	
						Jumlah SDM Kes, yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Fungsional.	371 orang	332.663.329	APBD Kabupaten	371 orang	990.950.000	80 orang	240.000.000	80 orang	240.000.000	80 orang	240.000.000	240 orang	2.043.613.329	
						Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan pembinaan peningkatan SDMKes	90 fasyankes	26.785.617	APBD Kabupaten	90 fasyankes	79.790.000	90 fasyankes	60.000.000	90 fasyankes	63.000.000	90 fasyankes	65.000.000	270 fasyankes	294.575.617	
						Jumlah kegiatan Penilaian angka kridit fungsional Nakes	2 klai	13.354.203	APBD Kabupaten	2 klai	39.780.000	2 klai	39.780.000	2 klai	39.780.000	2 klai	39.780.000	6 klai	172.474.203	
					72. Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman (APBD II & DAK)			16.478.423.005			13.377.645.500		17.505.050.000		18.352.802.500		20.094.582.750		85.808.503.755	
						Pertemuan Apoteker , pertemuan pemilik salon , pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana distribusi dan produsen Jamu Tradisional.	2 kali	39.587.000	APBD Kabupaten	6 kali	125.500.000	3 kali	60.000.000	3 kali	70.000.000	3 kali	80.000.000	9 kali	375.087.000	
						Monitoring dan supervisi Apotek , Rumah Sakit dan Klinik,monitoring dan supervisi sarana distribusi dan sarana produksi	2 kali	82.441.533	APBD Kabupaten	2 kali	101.630.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	6 kali	244.071.533	
						Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi industri Rumah Tangga (PIRT)	8 kali	82.441.533	APBD Kabupaten	8 kali	215.684.000	8 kali	250.000.000	8 kali	250.000.000	8 kali	250.000.000	24 kali	1.048.125.533	
						Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1 kali	82.441.533	APBD Kabupaten	1 kali	192.165.000	1 kali	170.000.000	1 kali	170.000.000	1 kali	170.000.000	3 kali	784.606.533	
						Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	20 item	15.648.281.229	DAK	20 item	11.897.549.000	20 item	16.255.050.000	20 item	17.067.802.500	20 item	18.774.582.750	20 item	79.643.265.479	
						Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 kali	9.162.500	APBD Kabupaten	3 kali	185.117.500	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	9 kali	494.280.000	
						Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	1 kali	534.067.677	APBD Kabupaten	1 kali	660.000.000	1 kali	650.000.000	1 kali	675.000.000	1 kali	700.000.000	3 kali	3.219.067.677	
					VIII. Program Upaya Pelayanan Kesehatan	**Persentase Puskesmas lulus akriditasi**	**0%**	**8.049.661.820**		**26%**	**9.271.593.100**	**100%**	**8.790.536.673**	**100%**	**8.802.648.973**	**100%**	**8.804.824.642**	**300%**	**43.719.265.208**	**Bidang Yankes**
						Persentase Faskes yang melayani Maskin	**0%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
						Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .	**100%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**300%**		
						Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	**0%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
					73. Pelayanan Kesehatan Primer			4.269.712.619			3.969.254.500		2.860.000.000		2.870.000.000		2.870.000.000		16.838.967.119	
						Jumlah Puskesmas yang yang di Survey IKM	39 Puskesmas	92.590.220	APBD Kabupaten	39 Puskesmas	200.560.000	39 Puskesmas	200.000.000	39 Puskesmas	200.000.000	39 Puskesmas	200.000.000	39 Puskesmas	893.150.220	
						Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	12 Puskesmas	1.285.257.139	APBD Kabupaten	12 Puskesmas	2.784.000.000	15 Puskesmas	2.000.000.000	12 Puskesmas	2.000.000.000	12 Puskesmas	2.000.000.000	39 Puskesmas	10.069.257.139	
						Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan Primer ke Provinsi	3 kali	3.462.438	APBD Kabupaten	3 kali	7.500.000	3 kali	10.000.000	3 kali	10.000.000	3 kali	10.000.000	9 kali	40.962.438	
						Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan Primer	5 kali	333.695.272	APBD Kabupaten	5 kali	722.818.500	5 kali	400.000.000	5 kali	400.000.000	5 kali	400.000.000	15 kali	2.256.513.772	

						Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk Peningkatan Program Pelayanan Primer	10 kali	2.554.707.550	APBD Kabupaten	10 kali	254.376.000	10 kali	250.000.000	10 kali	260.000.000	10 kali	260.000.000	30 kali	3.579.083.550	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					74. Pelayanan Kesehatan Rujukan			200.000.000			306.375.000		308.175.000		308.175.000		308.175.000		1.430.900.000	
						Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelyanan kesehatan rujukan	6 kali	46.168.911	APBD Kabupaten	6 kali	70.725.000	6 kali	70.725.000	6 kali	70.725.000	6 kali	70.725.000	18 kali	329.068.911	
						Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan	11 kali	153.831.089	APBD Kabupaten	11 kali	235.650.000	11 kali	237.450.000	11 kali	237.450.000	11 kali	237.450.000	33 kali	1.101.831.089	
					75. Pelayanan Kesehatan Tradisional			161.295.000			347.473.000		220.410.000		222.522.300		224.697.969		1.176.398.269	
						Jumlah supervisi program Batra ke Puskesmas	2 kali	32.683.923	APBD Kabupaten	2 kali	70.410.000	2 kali	70.410.000	2 kali	72.522.300	2 kali	74.697.969	6 kali	320.724.192	
						Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	7 kali	128.611.077	APBD Kabupaten	7 kali	277.063.000	6 kali	150.000.000	6 kali	150.000.000	6 kali	150.000.000	18 kali	855.674.077	
					76. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin			3.418.654.201			4.648.490.600		5.401.951.673		5.401.951.673		5.401.951.673		24.272.999.820	
						Jumlah maskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	394 jiwa	2.620.752.092	APBD Kabupaten	150 jiwa	3.563.548.914	150 jiwa	1.000.000.000	150 jiwa	1.000.000.000	150 jiwa	1.000.000.000	450 jiwa	9.184.301.006	
						Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan	10000 orang	797.902.109	APBD Kabupaten	4000 orang	1.084.941.686	10000 orang	4.401.951.673	10000 orang	4.401.951.673	10000 orang	4.401.951.673	30000 orang	15.088.698.814	
					IX. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	**Cakupan Desa/Kelurahan UCI**	**90%**	**1.589.347.286**		**90%**	**1.715.527.950**	**90%**	**1.818.406.555**	**90%**	**1.842.188.383**	**90%**	**1.767.188.383**	**90%**	**8.732.658.557**	**Bidang P2**
						Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)	**100%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
						Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatanpenderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)	**100%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
					77. Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,			482.389.036			617.150.000		613.470.000		613.470.000		613.470.000		2.939.949.036	
						Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutera Emas	12 kali	47.766.849	APBD Kabupaten	12 kali	56.160.000	12 kali	56.160.000	12 kali	56.160.000	12 kali	56.160.000	36 kali	272.406.849	
						Reflikasi Sutera Emas	1 kali	0	APBD Kabupaten	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	3 kali	200.000.000	
						Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah	1 kali	26.086.347	APBD Kabupaten	1 kali	30.670.000	1 kali	30.670.000	1 kali	30.670.000	1 kali	30.670.000	3 kali	148.766.347	
						Pengiriman sample KLB ke Surabaya	30 kali	19.775.271	APBD Kabupaten	30 kali	23.250.000	30 kali	23.250.000	30 kali	23.250.000	30 kali	23.250.000	90 kali	112.775.271	
						Jumlah Monev Tehnis surveilans dan Imunisasi	163 kali	56.263.836	APBD Kabupaten	163 kali	66.150.000	163 kali	66.150.000	163 kali	66.150.000	163 kali	66.150.000	489 kali	320.863.836	
						Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan Imunisasi	9 kali	76.578.356	APBD Kabupaten	9 kali	90.034.000	9 kali	90.034.000	9 kali	90.034.000	9 kali	90.034.000	27 kali	436.714.356	
						Jumlah Pelatihan Petugas Surveilan Epidemiologi Puskesmas	3 kali	77.690.024	APBD Kabupaten	3 kali	91.341.000	3 kali	91.341.000	3 kali	91.341.000	3 kali	91.341.000	9 kali	443.054.024	
						Review Tehnis program Sutera Emas	1 kali	8.616.064	APBD Kabupaten	1 kali	10.130.000	1 kali	10.130.000	1 kali	10.130.000	1 kali	10.130.000	3 kali	49.136.064	
						Jumlah Pemantauan KIPI + BIAS DT-TT survim	48 kali	13.613.042	APBD Kabupaten	48 kali	16.005.000	48 kali	16.005.000	48 kali	16.005.000	48 kali	16.005.000	144 kali	77.633.042	
						Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD	39 kali	9.287.998	APBD Kabupaten	39 kali	10.920.000	39 kali	10.920.000	39 kali	10.920.000	39 kali	10.920.000	117 kali	52.967.998	
						Jumlah Validasi Data survim	158 kali	37.151.993	APBD Kabupaten	158 kali	43.680.000	158 kali	40.000.000	158 kali	40.000.000	158 kali	40.000.000	474 kali	200.831.993	
						Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke Surabaya	30 kali	36.998.895	APBD Kabupaten	30 kali	43.500.000	30 kali	43.500.000	30 kali	43.500.000	30 kali	43.500.000	90 kali	210.998.895	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi	1 kali	38.402.301	APBD Kabupaten	1 kali	45.150.000	1 kali	45.150.000	1 kali	45.150.000	1 kali	45.150.000	3 kali	219.002.301	
						Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans dan Imunisasi	83 kali	34.158.060	APBD Kabupaten	83 kali	40.160.000	83 kali	40.160.000	83 kali	40.160.000	83 kali	40.160.000	249 kali	194.798.060	
					78. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular			906.958.250			799.299.950		829.300.000		834.300.000		759.300.000		4.129.158.200	
						Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot check)	6 lokasi	45.262.814	APBD Kabupaten	6 lokasi	39.890.000	6 lokasi	36.000.000	6 lokasi	36.000.000	6 lokasi	36.000.000	18 lokasi	193.152.814	
						Jumlah Pembinaan layanan laboratorium (TB, Malaria)	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	1 kali	12.000.000	1 kali	12.000.000	1 kali	12.000.000	3 kali	36.000.000	
						Jumlah Pertemuan perencanaan dan evaluasi kegiatan P2P	1 kali	18.073.354	APBD Kabupaten	1 kali	15.928.000	0 kali	30.000.000	0 kali	30.000.000	0 kali	30.000.000	0 kali	124.001.354	
						Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB, Malaria	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	3 kali	30.000.000	
						Jumlah Pertemuan monev P2 TB, kusta, diare, pneumonia, hepatistis, kecacingan, HIV, IMS, DBD, Malaria, Tim PPM	11 kali	198.578.765	APBD Kabupaten	11 kali	175.006.950	11 kali	120.000.000	11 kali	120.000.000	11 kali	120.000.000	33 kali	733.585.715	
						Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB, P2 DBD, P2 HIV	2 kali	174.649.329	APBD Kabupaten	2 kali	153.918.000	1 kali	25.000.000	1 kali	30.000.000	2 kali	105.000.000	4 kali	488.567.329	
						Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis, DBD, malaria, pneumonia, diare)	4 kali	39.345.401	APBD Kabupaten	3 kali	34.675.000	4 kali	48.000.000	4 kali	48.000.000	4 kali	48.000.000	12 kali	218.020.401	
						Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB HIV/IMS	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	0 kali	0	2 kali	300.000.000	
						Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat ke Surabaya, konsultasi ke Surabaya	28 kali	39.572.339	APBD Kabupaten	28 kali	34.875.000	36 kali	24.300.000	36 kali	24.300.000	36 kali	24.300.000	108 kali	147.347.339	
						Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	100 kali	260.127.852	APBD Kabupaten	100 kali	229.250.000	100 kali	150.000.000	100 kali	150.000.000	100 kali	150.000.000	300 kali	939.377.852	
						Jumlah Pengadaan pestisida	1 kali	74.889.589	APBD Kabupaten	1 kali	66.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	3 kali	590.889.589	
						Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular vektor dan zoonosis	60 kali	14.887.142	APBD Kabupaten	60 kali	13.120.000	60 kali	24.000.000	60 kali	24.000.000	60 kali	24.000.000	180 kali	100.007.142	
						Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD	2 kali	41.571.665	APBD Kabupaten	1 kali	36.637.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	6 kali	228.208.665	
					79. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa			200.000.000			299.078.000		375.636.555		394.418.383		394.418.383		1.663.551.321	
						Jumlah Bimbingan teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa	1 kali	33.436.094	APBD Kabupaten	1 kali	50.000.000	5 kali	53.350.000	5 kali	53.350.000	5 kali	53.350.000	15 kali	243.486.094	
						Jumlah Konsultasi Program PTM Ke Dinkes Propinsi	4 kali	8.559.640	APBD Kabupaten	4 kali	12.800.000	4 kali	8.500.000	4 kali	8.500.000	4 kali	8.500.000	12 kali	46.859.640	
						Jumlah Penyelidikan Epidemiologi/PE penemuan kasus pasung (gangguan kesehatan Jiwa)	4 kali	3.825.089	APBD Kabupaten	4 kali	5.720.000	4 kali	3.600.000	4 kali	3.600.000	4 kali	3.600.000	12 kali	20.345.089	
						Jumlah Penyelidikan Epidemiologi /PE pasca kasus pasung (gangguan kesehatan Jiwa)	4 kali	3.825.089	APBD Kabupaten	4 kali	5.720.000	4 kali	3.600.000	4 kali	3.600.000	4 kali	3.600.000	12 kali	20.345.089	
						Jumlah Skrening faktor resiko ke Posbindu Desa	6 kali	7.281.044	APBD Kabupaten	6 kali	10.888.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	18 kali	51.169.044	
						Jumlah Pertemuan Monev program (PTM, Keswa) yang dilakukan	2 kali	5.239.436	APBD Kabupaten	2 kali	7.835.000	2 kali	70.000.000	2 kali	70.000.000	2 kali	70.000.000	6 kali	223.074.436	
						Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Posbindu	1 kali	61.927.323	APBD Kabupaten	1 kali	92.605.500	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	3 kali	304.532.823	
						Jumlah Pertemuan Tehnis program yang dilakukan	6 kali	75.906.285	APBD Kabupaten	6 kali	113.509.500	6 kali	175.586.555	6 kali	194.368.383	6 kali	194.368.383	18 kali	753.739.106	
					X. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	**Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akriditasi dan yang melayani Maskin**	**0%**	**7.450.351.595**		**100%**	**7.716.464.595**	**100%**	**15.716.464.595**	**100%**	**16.716.464.595**	**100%**	**17.716.464.595**	**100%**	**65.316.209.975**	**Bidang SDK**
					80. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.	Jumlah Penambahan Ruangan/ Rehabilitasi Puskesmas	6 lokasi	7.450.351.595	DBHCHT	6 lokasi	7.716.464.595	6 lokasi	7.716.464.595	6 lokasi	7.716.464.595	6 lokasi	7.716.464.595	18 lokasi	38.316.209.975	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					81. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan melalui dana DBHCHT.	0 orang	0	APBD Kabupaten	0 orang	0	28000 orang	8.000.000.000	28500 orang	9.000.000.000	29000 orang	10.000.000.000	85500 orang	27.000.000.000	
					XI. Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT	**Persentase pelayanan UKP dan Managemen yang dilaksanakan**	**0%**	**0**		**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**87.085.826.611**	**100%**	**88.835.194.842**	**200%**	**175.921.021.453**	**Sekretariat**
					82. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dampit	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.907.782.143	2 Jenis	2.960.132.550	2 Jenis	5.867.914.693	
					83. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Donomulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	3.951.548.063	2 Jenis	4.035.064.167	2 Jenis	7.986.612.230	
					84. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dau	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.675.078.020	2 Jenis	1.695.831.921	2 Jenis	3.370.909.941	
					85. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gondanglegi	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.445.467.972	2 Jenis	2.495.315.671	2 Jenis	4.940.783.643	
					86. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kasembon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.729.179.000	2 Jenis	1.747.237.950	2 Jenis	3.476.416.950	
					87. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kepanjen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	3.324.713.211	2 Jenis	3.359.938.871	2 Jenis	6.684.652.082	
					88. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Singosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.350.190.963	2 Jenis	2.370.200.511	2 Jenis	4.720.391.474	
					89. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumberpucung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.013.640.614	2 Jenis	2.049.679.845	2 Jenis	4.063.320.459	
					90. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tumpang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	4.261.522.500	2 Jenis	4.341.398.625	2 Jenis	8.602.921.125	
					91. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Turen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	3.809.812.125	2 Jenis	3.895.302.731	2 Jenis	7.705.114.856	
					92. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ampelgading	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.514.220.000	2 Jenis	1.564.220.000	2 Jenis	3.078.440.000	
					93. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ardimulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.367.631.000	2 Jenis	1.417.631.000	2 Jenis	2.785.262.000	
					94. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bantur	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.650.540.000	2 Jenis	1.700.540.000	2 Jenis	3.351.080.000	
					95. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bululawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.746.260.000	2 Jenis	2.796.260.000	2 Jenis	5.542.520.000	
					96. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.905.913.000	2 Jenis	1.955.913.000	2 Jenis	3.861.826.000	
					97. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jabung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.032.316.000	2 Jenis	2.082.316.000	2 Jenis	4.114.632.000	
					98. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalipare	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.652.000.000	2 Jenis	1.702.000.000	2 Jenis	3.354.000.000	
					99. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Karangploso	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.285.801.000	2 Jenis	2.335.801.000	2 Jenis	4.621.602.000	
					100. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ketawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.277.389.000	2 Jenis	1.327.389.000	2 Jenis	2.604.778.000	
					101. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kromengan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	926.002.000	2 Jenis	976.002.000	2 Jenis	1.902.004.000	
					102. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.144.000.000	2 Jenis	2.194.000.000	2 Jenis	4.338.000.000	
					103. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngajum	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.236.767.500	2 Jenis	2.286.767.500	2 Jenis	4.523.535.000	
					104. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngantang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.524.000.000	2 Jenis	2.574.000.000	2 Jenis	5.098.000.000	
					105. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pagak	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.017.420.000	2 Jenis	1.067.420.000	2 Jenis	2.084.840.000	
					106. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pagelaran	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.357.568.683	2 Jenis	2.407.568.683	2 Jenis	4.765.137.366	
					107. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakis	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	4.254.640.000	2 Jenis	4.274.640.000	2 Jenis	8.529.280.000	
					108. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakisaji	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	3.328.068.000	2 Jenis	3.178.068.000	2 Jenis	6.506.136.000	

					109. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pamotan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.095.500.000	2 Jenis	2.110.500.000	2 Jenis	4.206.000.000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					110. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Poncokusumo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	3.338.750.000	2 Jenis	3.388.750.000	2 Jenis	6.727.500.000	
					111. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pujon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.502.359.000	2 Jenis	2.552.359.000	2 Jenis	5.054.718.000	
					112. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sitiarjo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.114.865.000	2 Jenis	1.164.865.000	2 Jenis	2.279.730.000	
					113. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas SumbermanjingKulon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	703.748.000	2 Jenis	753.748.000	2 Jenis	1.457.496.000	
					114. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas SumbermanjingWetan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.814.657.817	2 Jenis	1.864.657.817	2 Jenis	3.679.315.634	
					115. ??Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tajinan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.764.620.000	2 Jenis	1.814.620.000	2 Jenis	3.579.240.000	
					116. ??Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.276.700.000	2 Jenis	2.351.700.000	2 Jenis	4.628.400.000	
					117. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wagir	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.220.000.000	2 Jenis	2.270.000.000	2 Jenis	4.490.000.000	
					118. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wajak	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	2.445.975.000	2 Jenis	2.495.975.000	2 Jenis	4.941.950.000	
					119. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonokerto	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.173.926.000	2 Jenis	1.223.926.000	2 Jenis	2.397.852.000	
					120. Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	1.426.735.000	2 Jenis	1.476.735.000	2 Jenis	2.903.470.000	
					121. Kegiatan Pendukung Pelayanan BP Yankes	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	160.520.000	2 Jenis	210.520.000	2 Jenis	371.040.000	
					122. Layanan Labolatorium Kesehatan			0			0		0		140.000.000		145.000.000		285.000.000	
						Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	30.000.000	2 kali	30.000.000	4 kali	60.000.000	
						Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	0 Jenis	0	15 Jenis	65.000.000	15 Jenis	70.000.000	30 Jenis	135.000.000	
						Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	4 kali	20.000.000	
						Persiapan akreditasi	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	
						Pemantapan Mutu Eksternal	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	4 kali	20.000.000	
						Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat laboratorium	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	2 kali	40.000.000	
						Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk medukung operasional laboratorium	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	2 kali	10.000.000	
					123. Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan			0			0		0		218.000.000		221.200.000		439.200.000	
						Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes keluar daerah .	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	7 kali	12.600.000	8 kali	14.700.000	15 kali	27.300.000	
						Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka monitoring kalibrasi.	0 Fasyankes	0	APBD Kabupaten	0 Fasyankes	0	0 Fasyankes	0	100 Fasyankes	48.000.000	100 Fasyankes	48.000.000	200 Fasyankes	96.000.000	
						Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes.	0 paket	0	APBD Kabupaten	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	48.000.000	1 paket	48.000.000	2 paket	96.000.000	
						Jumlah konsultasi ke BPFK dalam rangka konsultasi pengujian dan kalibrasi .	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	8 kali	6.400.000	9 kali	7.500.000	17 kali	13.900.000	
						Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang dikalibrasikan ke BPFK/Intitusi Penguji dan Kalibrasi alkes	0 unit	0	APBD Kabupaten	0 unit	0	0 unit	0	11 unit	60.000.000	11 unit	60.000.000	11 unit	120.000.000	
						Jumlah pendampingan BPFK dalam rangka Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	3.000.000	2 kali	3.000.000	4 kali	6.000.000	
						Jumlah operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat kesehatan	0 paket	0	APBD Kabupaten	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	2 paket	80.000.000	
					XII. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD**	**0%**	**8.465.009.130**		**100%**	**8.540.487.310**	**100%**	**28.010.679.154**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**45.016.175.594**	**Sekretariat**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					124. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	1.011.475.262	APBD Kabupaten	2 jenis	1.033.132.485	2 jenis	2.857.924.613	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.902.532.360	
					125. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	357.834.191	APBD Kabupaten	2 jenis	326.640.000	2 jenis	1.655.312.400	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	2.339.786.591	
					126. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	1.436.630.861	APBD Kabupaten	2 jenis	1.450.887.000	2 jenis	3.872.008.918	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.759.526.779	
					127. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	827.223.234	APBD Kabupaten	2 jenis	891.396.325	2 jenis	2.397.993.973	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.116.613.532	
					128. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	318.077.976	APBD Kabupaten	2 jenis	319.800.000	2 jenis	1.711.980.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	2.349.857.976	
					129. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	640.851.770	APBD Kabupaten	2 jenis	608.585.000	2 jenis	3.291.164.963	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	4.540.601.733	
					130. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	522.345.733	APBD Kabupaten	2 jenis	410.000.000	2 jenis	2.331.134.250	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.263.479.983	
					131. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	601.576.277	APBD Kabupaten	2 jenis	643.461.500	2 jenis	1.979.317.537	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	3.224.355.314	
					132. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	1.367.511.910	APBD Kabupaten	2 jenis	1.423.200.000	2 jenis	4.185.450.000	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.976.161.910	
					133. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 jenis	1.381.481.916	APBD Kabupaten	2 jenis	1.433.385.000	2 jenis	3.728.392.500	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	6.543.259.416	
			Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	**Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per1.000 Kelahiran Hidup(KH)**				**33.792.929.770**			**47.031.774.400**		**43.683.910.503**		**43.686.410.503**		**43.691.910.503**		**211.886.935.679**	
					XIII. Program Peningkatan kesehatan masyarakat	**Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)**	**0%**	**2.016.608.516**		**100%**	**6.129.378.900**	**100%**	**3.551.709.200**	**100%**	**3.551.709.200**	**100%**	**3.551.709.200**	**100%**	**18.801.115.016**	**Bidang Kesmas**
						Persentase Balita kekurangan gizi	**0%**			**15%**		**15%**		**15%**		**15%**		**15%**		
						Prevalensi Balita Stunting	**0%**			**27%**		**27%**		**27%**		**27%**		**27%**		
					134. Peningkatan kesehatan keluarga.			926.353.117			1.342.682.600		577.057.900		577.057.900		577.057.900		4.000.209.417	
						Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas	3 kali	536.531.714	APBD Kabupaten	3 kali	863.925.400	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	9 kali	1.700.457.114	
						Jumlah Pertemuan Validasi Data Kesga Puskesmas	8 kali	125.190.862	APBD Kabupaten	8 kali	52.648.100	8 kali	104.952.800	8 kali	104.952.800	8 kali	104.952.800	24 kali	492.697.362	
						Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Kesga	5 kali	125.190.862	APBD Kabupaten	5 kali	201.582.800	5 kali	199.883.500	5 kali	199.883.500	5 kali	199.883.500	15 kali	926.424.162	
						Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan kopetensi tenaga kesehatan pemegang program KIA	6 kali	40.400.414	APBD Kabupaten	6 kali	65.052.900	6 kali	75.288.800	6 kali	75.288.800	6 kali	75.288.800	18 kali	331.319.714	
						Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kompetensi pemegrang program Kesga	8 kali	99.039.265	APBD Kabupaten	8 kali	159.473.400	8 kali	96.932.800	8 kali	96.932.800	8 kali	96.932.800	24 kali	549.311.065	
					135. Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	Jumlah Bumil Maskin yang mendapat jaminan pembiayaan persalinan	800 Maskin	565.606.900	DAK	800 Maskin	3.932.059.000	900 Maskin	2.159.014.000	1000 Maskin	2.159.014.000	1000 Maskin	2.159.014.000	2900 Maskin	10.974.707.900	
					136. Upaya Penanggulangan Gizi			524.648.499			854.637.300		815.637.300		815.637.300		815.637.300		3.826.197.699	
						Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI Balita Gakin dan Makanan Kering Pelacakan Gizi Buruk	4 macam	196.338.645	APBD Kabupaten	4 macam	319.830.000	4 macam	512.250.000	4 macam	512.250.000	4 macam	512.250.000	12 macam	2.052.918.645	
						Jumlah Alat peraga Food Model yang diadakan	1 kali	23.941.491	APBD Kabupaten	1 kali	39.000.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	62.941.491	

						Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Gizi	5 kali	223.870.808	APBD Kabupaten	5 kali	364.679.100	7 kali	210.000.000	7 kali	210.000.000	7 kali	210.000.000	21 kali	1.218.549.908	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Jumlah Pertemuan Penyususunan rencana dan bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan Rapat evaluasi Program Gizi dan Pelacakan Gizi Buruk dan stunting	5 kali	80.497.555	APBD Kabupaten	5 kali	131.128.200	6 kali	93.387.300	6 kali	93.387.300	6 kali	93.387.300	18 kali	491.787.655	
					XIV. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	**Persentase cakupan Lokasi ODF**	**0%**	**31.776.321.254**		**60%**	**40.902.395.500**	**70%**	**40.132.201.303**	**80%**	**40.134.701.303**	**80%**	**40.140.201.303**	**80%**	**193.085.820.663**	**Bidang Kesmas**
						Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	**0%**			**14%**		**14%**		**14%**		**14%**		**14%**		
						Persentase program yang difasilitasi media promosinya	**0%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
						Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas	**0%**			**50%**		**60%**		**80%**		**100%**		**100%**		
					137. Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga			805.883.929			4.717.230.000		3.368.150.000		3.368.150.000		3.368.150.000		15.627.563.929	
						Jumlah Kegiatan Perencanaan, Validasi data pelaporan, Implementasi, dan Monev Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Keg.	5.822.445	APBD Kabupaten	9 Keg.	74.772.000	9 Keg.	61.750.000	9 Keg.	61.750.000	9 Keg.	61.750.000	27 Keg.	265.844.445	
						Jumlah pengawasan makanan dan sarana air minum	200 sampel	3.671.413	APBD Kabupaten	200 sampel	33.800.000	260 sampel	10.400.000	260 sampel	10.400.000	260 sampel	10.400.000	780 sampel	68.671.413	
						Jumlah Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	6 Keg.	710.394.280	APBD Kabupaten	3 Keg.	313.100.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	1.150.994.280	
						Jumlah Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	4 Keg.	31.205.205	APBD Kabupaten	4 Keg.	76.910.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	42.500.000	7 Keg.	235.615.205	
						Jumlah Pembangunan Stimulan Jamban Keluarga Miskin, Percontohan MCK Sehat dan Rumah Sehat	0 unit	0	APBD Kabupaten	706 unit	3.794.035.000	500 unit	2.700.000.000	500 unit	2.700.000.000	500 unit	2.700.000.000	1500 unit	11.894.035.000	
						Jumlah Sarana pendukung STBM dan pembinaan TTU - TPM	0 Unit	0	APBD Kabupaten	3 Unit	349.000.000	23 Unit	296.000.000	23 Unit	296.000.000	23 Unit	296.000.000	69 Unit	1.237.000.000	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	0 Keg.	0	APBD Kabupaten	2 Keg.	33.860.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	356.360.000	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	2 Keg.	54.790.586	APBD Kabupaten	2 Keg.	41.753.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	107.500.000	9 Keg.	419.043.586	
					138. Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK-DAK)	Jumlah jenis Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Jenis	20.476.168.450	DAK	2 Jenis	25.025.063.000	2 Jenis	25.025.063.000	2 Jenis	25.025.063.000	2 Jenis	25.025.063.000	2 Jenis	120.576.420.450	
					139. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan			1.248.928.625			1.794.616.000		1.101.202.500		1.103.702.500		1.109.202.500		6.357.652.125	
						Jumlah Bimtek kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	7 kali	106.449.582	APBD Kabupaten	7 kali	152.960.000	7 kali	137.325.000	7 kali	137.325.000	7 kali	137.325.000	21 kali	671.384.582	
						Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media Cetak	15 Jenis	208.330.377	APBD Kabupaten	15 Jenis	299.355.000	14 Jenis	367.325.000	14 Jenis	367.325.000	14 Jenis	370.325.000	42 Jenis	1.612.660.377	
						Jumlah Pertemuan Program Promkes dan Pemberdayaan	16 kali	687.014.229	APBD Kabupaten	16 kali	987.187.500	10 kali	297.554.500	10 kali	297.554.500	10 kali	297.554.500	30 kali	2.566.865.229	
						Jumlah Promosi kesehatan melalui media elektronik	49 kali	28.011.216	APBD Kabupaten	49 kali	40.250.000	48 kali	28.000.000	48 kali	28.000.000	48 kali	28.000.000	144 kali	152.261.216	
						Jumlah Monev dan Bintek PIS-PK dan Intervensi KS di Puskesmas	0 Kali	0	APBD Kabupaten	0 Kali	0	4 Kali	40.000.000	4 Kali	40.000.000	4 Kali	40.000.000	12 Kali	120.000.000	
						Jumlah even Germas	1 kali	34.796.542	APBD Kabupaten	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	3 kali	234.796.542	
						Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba	5 kali	149.530.137	APBD Kabupaten	5 kali	214.863.500	5 kali	150.998.000	5 kali	150.998.000	5 kali	150.998.000	15 kali	817.387.637	
						Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pameran	1 kali	34.796.542	APBD Kabupaten	1 kali	50.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	32.500.000	1 kali	35.000.000	3 kali	182.296.542	

					140. Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)	Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan Provinsi	39 Pusk.	9.245.340.250	Bantuan Provinsi	39 Pusk.	9.365.486.500	39 Pusk.	10.637.785.803	39 Pusk.	10.637.785.803	39 Pusk.	10.637.785.803	39 Pusk.	50.524.184.159	
T O T A L				**TUJUAN : 1 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 14 KEGIATAN : 140**				**199.557.037.928**			**199.754.610.776**		**222.373.903.980**		**230.114.019.565**		**234.933.478.715**		**687.421.402.260**	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG

Dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengacu pada ***RPJMD*** Kabupaten Malang pada Misi 3 : **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatan Indeks Pembangunan Manusia**, dengan Tujuan 1 (satu) : ***Meningkatkan daya saing*** dan Sasaran adalah sasaran 1(satu) yaitu : ***Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan*** dengan Indikator sasaran nomor 1 (satu) yaitu : ***Indek Pembangunan Manusia***, Untuk mendukung tercapaianya tujuan dan sasaran bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021, sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 .

TABEL. 6.1. (1)
MATRIK INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal (2016)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir pereode Renstra
			2018	2019	2020	2021	
1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.	76,46	75,5	76	76,5	77	77
2	Angka kematian ibu per 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH						
-	Angka kematian ibu per 100.000 KH	52,78 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH	118 / 100.000 KH
-	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	4,52/ 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH	24 / 1.000 KH

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini didasarkan pada hasil diskusi pada Rapat Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan melakukan analisis bersama yang merupakan upaya stratejik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah untuk menyesuaikan manajemen Dinas Kesehatan yang acceptable.

Setiap program dan kegiatan disusun sesuai dengan hasil analisis lingkungan dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mensukseskan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program dan kegiatan dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat melalui standar pelayanan minimal dengan pengembangan inovasi-inovasi unggulan dari masing-masing program atau masing-masing puskesmas ataupun pelaksana program dan kegiatan itu sendiri.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala bulanan, tribulanan, semester dan tahunan atau tergantung situasi keadaan saat itu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi petugas kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan,

sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

Malang , Agustus 2017.

KEPALA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes

BERITA ACARA

HASIL FINALISASI NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

Pada hari jumat tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ruang Rapat Anusapati Lantai 2 Jalan Merdeka Timur No. 3 Malang telah melaksanakan rapat finalisasi nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dalam rangka penyempurnaan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang dihadiri sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 188.4/137/KEP/35.07.103/2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

MENYEPAKATI

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 terkait Nomenklatur Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

KEDUA : Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian PD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator PD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VI : PENUTUP

KETIGA : Perumusan Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk dirumuskan pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan berdasarkan ketentuan dan aturan yang beraku;

KEEMPAT : Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk segera menetapkan Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016-2021 pada aplikasi ***E-Renstra*** dan menjadi lampiran Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 pada bab V tabel 5.1 (Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif), perubahan Renstra ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

KELIMA : Apabila ada ketidaksesuaian Nomenklatur Rencana Program Prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk Tahun 2018-2021 dengan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, dimohon kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melampirkan surat penyesuaian atas perubahan nomenklatur rencana program dengan analisa atau ketentuan yang mendasari;

KEENAM : Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jl . Raden Panji No. 158 lantai 6 Kepanjen, paling lambat tanggal 9 Agustus 2017 dalam bentuk 1 (satu) buku dan soft copy.

Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 4 Agustus 2017

Mengetahui,	Menyetujui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang	KEPALA DINAS KESEHATAN
Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.	dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes
Pembina Utama Muda	
NIP. 19661126 199303 1 004	

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
Jl. Panji No.120 Kepanjen Telepon (0341) 391621, Fax. (0341) 393731
E-mail : *dinkes@malangkab.go.id*- Website : http://dinkes.malangkab.go.id

K E P A N J E N 6 5 1 6 3

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/120/KEP/35.07.103/2017

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Reviu dan Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tahun 2015 Tentang Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/ 134/KEP/35.07.103/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal Agustus 2017

KEPALA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
Jln. Panji No.120 Kepanjen Telepon (0341) 393730, Fax. (0341) 393731
E-mail : *dinkes@malangkab.go.id*- Website : http://dinkes.malangkab.go.id
M A L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 180/19.B/KEP/35.07.103/2017

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program – program pembangunan bidang kesehatan serta laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan kridibel pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang perlu suatu perumusan perencanaan dan evaluasi yang tersusun dengan baik dan benar.
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a agar berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Perencanaandan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Mengingat :
1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri no 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri no 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 32 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membuat / menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
b. Membuat / menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021, sesuai tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala pembiayaan untuk kegiatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaja Daerah [APBD] Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika diperlukan.

Ditetapkan : Di Kepanjen
pada tanggal : 30 Januari 2017.

KEPALA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes

LAMPIRAN. 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 180/19.B /KEP/35.07.103/2017
TANGGAL : 30 Januari 2017.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

NO.	JABATAN DALAM PANITIA		NAMA	KETERANGAN
1.	Pengarah	:	dr.H. Abdurrachman, M.Kes..	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
2.	Ketua	:	Drs. Nandang Djumantara	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris	:	Yudiono.S.Kep.M.Kes.	Kepala Subag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan.
4.	Anggota	:	• Lulus Condro T, M.Kes, NS,Msi	Kapala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.
			• dr. RA. Ratih Maharani, MMRS	Kapala Bidang Pelayanan Kesehatan
			• Gunawan Djoko U , SKM, M.Si.	Kapala Bidang Kesehatan Masyarakat
			• Drs. M. Nur. Fuad Fauzi. MT	Kapala Bidang Sumber Daya Kesehatan
			• Johan Charles, SE	Kepala Subag. Keuangan
			• Yoyok Ibnu.H ,SE.Msi.	Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian.
			• Narno Santoso, ST	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa
			• Tajudinnor,SE, M.Si	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
			• Tri Awignami Astoeti, SKM	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
			• Puji Hadi Prastyo, SE.	Kepala Seksi Alkes dan PKRT
			• Nur Khulaillah, Ssi,Apt	Kepala Seksi Kefarmasian.
			• Agus Suparwanto, SKM	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
			• Retno Endarti, SKM,MKes.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.
			• Hardoyo, SST.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
			• dr. Hilma Eviyeni	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
			• Agus Suprijanto, SKM	Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Kesehatan.
			• Sunaryuhati, SKM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
			• drg. Anita Flora	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
			• Drs. Uji Sasono	Staf Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes